

**MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI SEKOLAH INKLUSIF
(Studi Kasus di SMAN 14 Bandar Lampung)**

Tesis

Oleh

FERTIKA DWI YOSWITA

NPM 2023012001



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI SEKOLAH INKLUSIF

(Studi Kasus Di SMAN 14 Bandar Lampung)

Oleh

FERTIKA DWI YOSWITA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen sarana dan prasarana di sekolah inklusif SMAN 14 Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, jenis dan rancangan penelitian studi kasus. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, studi dokumen. Tahap analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penarikan data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung yakni: 1) perencanaan dilakukan dengan analisis kebutuhan 2) Pengadaan sarana dan prasarana sekolah inklusif sudah dilakukan dengan baik, pengadaan sarana dan prasarana berasal dari dinas pendidikan dan pengadaan sendiri dengan cara pembelian, 3) Pemeliharaan sarana prasarana sekolah inklusif dilakukan oleh sekolah, semua terlibat dalam proses pemeliharaan, 4) Hambatan yang muncul dalam penyediaan sarana prasarana untuk sekolah inklusi adalah dana. 5) Faktor yang mendukung dalam sekolah penyelenggaraan inklusif di SMAN 14 adalah dengan adanya SK.

Kata Kunci : Manajemen sarana dan prasarana, sekolah inklusif, anak berkebutuhan khusus.

ABSTRACT

FACILITIES AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT IN INCLUSIVE SCHOOL

(Case Study at SMAN 14 Bandar Lampung)

By

FERTIKA DWI YOSWITA

This study aims to describe the management of facilities and infrastructure in inclusive schools at SMAN 14 Bandar Lampung. The research method uses qualitative research, the type and design of the case study research. The data were collected by using interviews, observations, document studies. Data analysis phase with data collection, data reduction, data withdrawal and data verification. The results showed that the management of inclusive school facilities and infrastructure at SMAN 14 Bandar Lampung, namely: 1) planning was carried out by needs analysis 2) Procurement of inclusive school facilities and infrastructure had been carried out properly, procurement of facilities and infrastructure came from the education office and procurement itself by way of purchases, 3) Maintenance of inclusive school infrastructure is carried out by schools, all are involved in the maintenance process, 4) Barriers that arise in the provision of infrastructure for inclusive schools are funds. 5) The supporting factor in implementing inclusive schools at SMAN 14 is the existence of a decree.

Keywords: Management of facilities and infrastructure, inclusive schools, children with special needs.

**MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI SEKOLAH INKLUSIF
(Studi Kasus di SMAN 14 Bandar Lampung)**

Oleh

FERTIKA DWI YOSWITA

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER PENDIDIKAN

Pada

**Program Pascasarjana Magister Administrasi Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI SEKOLAH INKLUSIF (STUDI KASUS DI SMAN 14 BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Fertiqa Dwi Yoswita**

No. Pokok Mahasiswa : **2023012001**

Program Studi : **S-2 Magister Administrasi Pendidikan**

Jurusan : **Ilmu Pendidikan**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**




Dr. Sowiyah, M.Pd.
NIP 19600725 198403 2 001


Dr. Riswanti Rini, M.Si.
NIP 19600328 198603 2 002

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Pendidikan


Dr. Riswandi, M.Pd.
NIP 19760808 200912 1 001


Dr. Sowiyah, M.Pd.
NIP 19600725 198403 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Sowiyah, M.Pd.**

Sekretaris : **Dr. Riswanti Rini, M.Si.**

Penguji Anggota : **1. Hasan Hariri, S.Pd., MBA, Ph.D.**

2. Dr. Ryzal Perdana., M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

NIP 19620804 198905 1 001



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 30 Maret 2022

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERTIKA DWI YOSWITA
NPM : 2023012001
Program Studi : Magister Administrasi Pendidikan

1. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul
“MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI SEKOLAH
INKLUSIF (Studi Kasus Di SMAN 14 Bandar Lampung)” adalah karya
saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas
karya peneliti lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah
yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah diserahkan sepenuhnya kepada
Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya
ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan
kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang
berlaku.

Bandar Lampung, 24 Maret 2022

Pembuat pernyataan



Fertika Dwi Yoswita
NPM. 2023012001

RIWAYAT HIDUP



Fertika Dwi Yoswita dilahirkan di Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Pada Tanggal 14 April 1990, sebagai anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Bapak Zaid Husein dan Ibu Indun Purwati.

Pendidikan di tempuh mulai Sekolah Dasar di SDS Rawa Rejo Kisam Jaya Kabupaten Lampung Barat transmigrasi ke SD Negeri 9 Kabupaten Pringsewu diselesaikan tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pringsewu diselesaikan tahun 2006, lalu melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2009.

Tahun 2009 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi melalui Jalur Penerimaan Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB) Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan menyelesaikan studi pada tanggal 9 Mei 2014. Pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, peneliti menjadi staf tenaga kependidikan di Universitas Lampung. Selanjutnya pada tahun 2020 peneliti diterima sebagai mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan di Universitas Lampung dan menyelesaikan studi pada tahun 2022.

MOTTO

“Setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan, tidak ada ciptaan Allah yang gagal, Allah menciptakan anak sesempurna mungkin dengan keunikannya masing-masing”

(Dr. Sowiyah, M.Pd.)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Almamater Universitas Lampung.
2. Ayah dan ibuku tercinta, Zaid Husein dan Ibu Indun Purwati yang memberikan kasih sayang tiada batasnya serta memberikan dukungan yang luar biasa.
3. Kakak Perempuan, Merry Zia Ambarini dan abang iparku Fauzan yang telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa.
4. Adik lelaki, M. Nazril Tri Wardana yang juga telah menemani, memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa.
5. Keponakanku, M. Elfatih Fabrizio dan Fazia Ramsha Farzana yang senantiasa menghibur dan memberikan semangat kepadaku dalam proses penyelesaian tesis ini.

SANWACANA

Puji Syukur peneliti kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul ‘Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah Inklusif (Studi Kasus Di SMAN 14 Bandar Lampung)’ adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Pascasarjana Administrasi Pendidikan Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung yang telah memberikan arahan dan kemudahan.
3. Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah memfasilitasi penelitian ini.
4. Dr. Riswanti Rini, M.Si., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus Sekretaris Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah memfasilitasi penelitian ini.
6. Dr. Sowiyah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Lampung sekaligus Pembimbing Akademik dan Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi serta dukungan yang sangat membantu dalam proses penyusunan tesis ini.
7. Hasan Hariri, S.Pd., MBA., Ph.D., selaku Penguji 1 atas bimbingan, arahan, saran, motivasi serta dukungan yang sangat membantu dalam proses penyusunan tesis ini.

8. Dr. Ryzal Perdana, M.Pd., selaku Penguji 2 atas bimbingan, arahan, saran, motivasi serta dukungan yang sangat membantu dalam proses penyusunan tesis ini.
9. Ibu Sevensari, S.Pd., M.M. selaku Kepala Sekolah dan Ibu Herni, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 14 Bandar Lampung yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian serta motivasi yang sangat berharga .
10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
11. Keluarga Besar saya Hi. Kumpul Harianto yang telah memberikan semangat, dukungan doa, kasih sayang serta supportnya untuk saya.
12. Sahabat-sahabat saya di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung yang selalu memberikan semangat dan motivasi dari awal saya melanjutkan pendidikan hingga tahap penyusunan tesis ini.
13. Terimakasih mbak Fathia, Agung, pak Syahroni, Kartika, Regita, Sonia, yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan, waktu, menjadi pendengar yang baik, dan dukungan yang luar biasa demi kelancaran penyelesaian tesis ini.
14. Teman-teman mahasiswa Administrasi Pendidikan angkatan 2020 dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga dapat memberi kontribusi dalam bidang ilmu manajemen pendidikan Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2022

Fertika Dwi Yoswita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
COVER DALAM	IV
HALAMAN PERSETUJUAN	V
HALAMAN PENGESAHAN	VI
PERNYATAAN	VII
RIWAYAT HIDUP	VIII
MOTTO	IX
PERSEMBAHAN	X
SANWACANA	XI
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR TABEL	XVII
DAFTAR GAMBAR	XVIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIX

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus Penelitian.....	6
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.5.1. Manfaat Teoretis.....	8
1.5.2. Manfaat Praktis.....	8
1.6. Definisi Istilah.....	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Sekolah Inklusif	11
2.1.1. Pengertian Manajemen Sekolah Inklusif.....	11
2.1.2. Fungsi Manajemen	12
2.2. Pendidikan Inklusif	16
2.2.1. Pengertian Pendidikan Inklusif	16
2.2.2. Tujuan Pendidikan Inklusif.....	18
2.2.3. Landasan Pendidikan Inklusif.....	19
2.2.4. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Indonesia.....	21

2.2.5. Kriteria Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	23
2.2.6. Mekanisme Penyelenggaraan Inklusif	24
2.2.7. Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif	24
2.2.8. Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	25
2.3. Anak Berkebutuhan Khusus	25
2.3.1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus	25
2.3.2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus	26
2.4. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan	28
2.4.1 Perencanaan Sarana dan Prasarana Persekolahan	30
2.4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana	31
2.4.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	32
2.4.4 Pengawasan Sarana dan Prasarana	35
2.4.5 Konsep Sarana dan Prasarana Pendidikan	38
2.4.6 Fungsi Sarana dan Prasarana Pendidikan	40
2.4.7 Jenis Sarana dan Prasarana Pendidikan	41
2.4.8 Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana Pendidikan	41
2.4.9 Kegiatan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan	43
2.4.10 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	57
2.5. Kerangka Pikir	58

III. METODE PENELITIAN

3.1. Setting Penelitian	61
3.1.1. Lokasi dan Tempat Penelitian	61
3.1.2. Waktu Penelitian	61
3.2. Jenis dan Rancangan Penelitian	61
3.3. Kehadiran Penelitian	64
3.4. Sumber Data Penelitian	66
3.5. Teknik Pengumpulan Data	67
3.5.1. Observasi	67
3.5.2. Wawancara mendalam	68
3.5.3. Dokumentasi	69
3.6. Analisis Data Penelitian	70
3.6.1. Pengumpulan Data	70
3.6.2. Reduksi Data	71
3.6.3. Display Data	71
3.6.4. Kesimpulan	71
3.6.5. Kesimpulan Akhir	72
3.7. Pengecekan Keabsahan Data	72
3.7.1. Ketekunan Pengamatan	73
3.7.2. Triangulasi	73
3.7.3. Pemeriksaan Sejawat	74

3.8. Tahapan Penelitian.....	74
------------------------------	----

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Lokasi Penelitian	77
4.2. Paparan Data Penelitian	81
4.3. Temuan Peneliti	99
4.4. Pembahasan.....	108

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	116
5.2. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Siswa Inklusif SMAN 14 Bandar Lampung.....	5
2. Informan penelitian.....	66
3. Pengkodean informan	67
4. Pedoman Observasi.....	68
5. Pedoman Wawancara.....	69
6. Pedoman Studi Dokumen	70
7. Matriks Perencanaan.....	100
8. Matriks Pengadaan.....	101
9. Matriks Pemeliharaan	103
10. Matriks Hambatan.....	105
11. Matriks Pendukung	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	60
2. Langkah Analisis Data Penelitian Milles dan Huberman	72
3. Diagram konteks perencanaan	100
4. Diagram konteks pengadaan	103
5. Diagram konteks pemeliharaan	104
6. Diagram konteks hambatan.....	106
7. Diagram konteks pendukung	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Observasi	123
2. Pedoman Wawancara	124
3. Daftar Dokumen.....	127
4. Struktur Organisasi SMAN 14 Bandar Lampung.....	128
5. Data Wawancara Informan	129
6. Dokumen Observasi	140
7. Studi Dokumen	141
8. Surat Izin Penelitian	142
9. Balasan Surat Izin Penelitian	143
10. SK Tim Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif.....	144
11. SK Tim GPK Inklusif	145
12. Foto-Foto.....	146

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak semua warga negaranya serta dapat diperoleh dimana saja, dan kapan saja baik secara formal, non formal, dan informal. Karena itu Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang tertuang pada Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 tentang Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara, tanpa diskriminatif, dapat disimpulkan bahwa Negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu (Martha & Suryana).

Serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Selama ini anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda atau keterbatasan diri (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis keterbatasannya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) (Depdiknas, 2009).

Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok pemisah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tembok tersebut selama

ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel dengan anak-anak non difabel. Trimo berpendapat bahwa, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan satuan pendidikan yang menerapkan falsafah pendidikan yang ramah atau “welcoming school”, tidak diskriminatif, dan menerima keanekaragaman. sekolah inklusi menerima peserta didik dari latar belakang yang beragam, baik secara fisik, sosial, ekonomi, intelektual, emosi, dan budaya, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kategori peserta didik yaitu peserta didik normal, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik yang berbakat (Martha & Suryana).

Untuk mengatasi masalah tersebut dibuatlah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menempatkan anak yang memiliki kebutuhan khusus bersama dengan anak normal dalam satu sekolah umum. Sedangkan Illahi (2013) mengemukakan bahwa di Indonesia pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal lainnya di sekolah reguler yang terdekat dari rumah sehingga anak berkebutuhan khusus sebisa mungkin tidak dipisahkan dengan lingkungannya.

Kustawan (2013) menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasikan semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Pendidikan inklusif merupakan sesuatu yang baru di dunia pendidikan Indonesia. Istilah pendidikan inklusif atau inklusi, mulai mengemuka sejak tahun 1990, ketika konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, yang diteruskan dengan pernyataan tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994. Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak-anak sebayanya di sekolah reguler (James, 2008:25).

Selanjutnya Staub and Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Tujuan Pendidikan Inklusi adalah memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin agar meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal (Gargiulo & Kilgo, 2005).

Pada pendidikan inklusif memerlukan beberapa sarana dan prasarana khusus untuk memperlancar proses pembelajaran khususnya bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sarana dan prasarana dalam pendidikan mempunyai peranan penting. Jika sarana dan prasarana tidak menjadi prioritas maka akan mengurangi mutu kualitas pendidikan. Yudi (2012), menjelaskan bahwa hal utama yang meningkatkan mutu pendidikan dan membantu peserta didik berkembang secara optimal ialah dengan menyediakan sarana prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana dianggap penting dalam peningkatan mutu pendidikan.

Kartikasari (2014) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif memerlukan beberapa sarana dan prasarana khusus untuk memperlancar proses pembelajaran khususnya bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Alat-alat tersebut seperti buku berhuruf “braille”, keramik timbul, alat terapi motorik, komputer dengan aplikasi khusus, ruangan khusus, dan lain sebagainya.

Amka (2020) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sarana Sekolah Penyelenggara Inklusi” menyatakan pada umumnya ada empat (4) fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan (directing) dan fungsi pengendalian (controlling).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pendidikan inklusif di sekolah, berikut dipaparkan hasil penelitian awal tentang pendidikan inklusif di sekolah jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA/ SMK) di propinsi Lampung. Berdasarkan hasil evaluasi penelitian Sowiyah (2020) diketahui bahwa capaian penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah yang mencapai nilai tertinggi pada aspek kurikulum, capaian sedang diperoleh dari aspek pembelajaran dan terendah aspek sarana dan prasarana. Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang difahami dan diimplementasikan oleh sekolah.

Manajemen sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pengelolaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. ini menunjukkan bahwasanya sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan ini bertujuan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana bisa berjalan dengan baik (Sinta, 2019).

Menurut Adisel (2019) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Mengingat aspek sarana dan prasarana sekolah inklusif itu sangat penting untuk dilakukan di sekolah, maka perlu dilakukan proses perencanaan, dimana pengertian perencanaan menurut Tarigan (2020) perencanaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan arah sasaran demi mencapai tujuan.

Ada beberapa sekolah di Provinsi Lampung sebagai penyelenggara sekolah inklusif salah satunya adalah SMAN 14 Bandar Lampung, karena itu peneliti memilih SMAN 14 Bandar Lampung sebagai sekolah penyelenggara inklusif,

selain lokasi sekolahnya yang strategis dan menjadi salah satu favorit terselenggaranya sekolah inklusif SMAN 14 Bandar Lampung juga dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus di SMAN 14 Bandar Lampung mampu menoreh prestasi yang membanggakan dengan didapatkannya Juara 1 oleh siswa kelas 12 IPA 1 bernama Mutia Febi Triastuti dalam lomba literasi inklusi daring tingkat nasional 2018 yang diselenggarakan di Jambi pada tanggal 6 November 2018. Oleh karena itu penulis tertarik memilih SMAN 14 Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan hasil observasi awal yang didapatkan oleh peneliti terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung selama 5 tahun terakhir seperti terlihat pada tabel 1.1 adalah pendukung sarana dan prasarana di sekolah inklusif SMAN 14 Bandar Lampung.

Tabel 1.1 Data siswa inklusi selama 5 (lima) tahun terakhir Pada SMAN 14

No	Tahun Pelajaran	Jumlah Abk	Keterangan
1	2017/2018	7	tuna daksa (1), tuna rungu (2), lambat belajar (2), tuna graha (1), low vision (1)
2	2018/2019	16	tuna daksa (2), lambat belajar (10), tuna netra (2), tuna rungu (2)
3	2019/2020	11	tuna daksa (3), lambat belajar (6), tuna netra (1), tuna rungu (1)
4	2020/2021	9	lambat belajar (5), tuna daksa (3), tuna netra (1),
5	2021/2022	9	Lambat belajar (6), tuna daksa (3)

Sumber : Data SMAN 14 Bandar Lampung

Berdasarkan tabel di atas pada tahun pelajaran 2017/2018 terdapat 7 ABK yang diklasifikasikan ke dalam kategori tuna daksa 1 orang, tuna rungu 2 orang, lambat belajar 2 orang, tuna graha 1 orang, dan low vision 1 orang. pada tahun pelajaran 2018 /2019 terdapat 16 ABK yang diklasifikasikan ke dalam kategori tuna daksa 2 orang, lambat belajar 10 orang, tuna netra 2 orang, dan tuna rungu 2 orang. pada tahun pelajaran 2019/2020 terdapat 11 ABK yang diklasifikasikan ke dalam kategori tuna daksa 3 orang, lambat belajar 6 orang, tuna netra 1 orang, dan tuna rungu 1 orang. Pada tahun pelajaran 2020/2021 terdapat 9 ABK yang diklasifikasikan ke dalam kategori lambat

belajar 5 orang, tuna daksa 3 orang, dan tuna netra 1 orang. kemudian yang terakhir pada tahun pelajaran 2021/2022 terdapat 9 ABK yang diklasifikasikan ke dalam kategori lambat belajar 6 orang dan tuna daksa 3 orang. Dari data yang diperoleh selama 5 tahun terakhir, jumlah siswa inklusi terbanyak terdapat pada tahun pelajaran 2018/2019 dengan jumlah 16 ABK. dan kategori klasifikasi terbanyak terdapat pada kategori lambat belajar yaitu berjumlah 28 orang, dari jumlah total secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir yang berjumlah 52 ABK di SMAN 14 Bandar Lampung.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada “Manajemen Sarana dan Prasarana Di Sekolah Inklusif (Studi Kasus Di SMAN 14 Bandar Lampung)”. Dari fokus penelitian tersebut dikembangkan menjadi sub fokus penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Perencanaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung
- 1.2.2 Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung
- 1.2.3 Pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung
- 1.2.4 Hambatan sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung
- 1.2.5 Pendukung sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung?
- 1.3.2. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung?

- 1.3.3 Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung
- 1.3.4 Bagaimana hambatan sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung?
- 1.3.5 Bagaimana pendukung sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

- 1.4.1 Perencanaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung
- 1.4.2 Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung
- 1.4.3 Pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung
- 1.4.4 Hambatan sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung
- 1.4.5 Pendukung sarana dan prasarana di sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Secara Teoretis

Penelitian ini bermanfaat pada bidang keilmuan manajemen pendidikan /administrasi pendidikan serta memberikan kontribusi akademik tentang manajemen sarana dan prasarana dalam mewujudkan sekolah inklusif.

1.5.2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi;

- 1.5.2.1 Kepala Sekolah SMAN 14 Bandar Lampung sebagai bahan

pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah inklusif yang efektif.

- 1.5.2.2 Pendidik, sebagai bahan referensi para pendidik dalam mengefektifkan pengelolaan sarana yang dimiliki oleh sekolah secara bijak dan baik.
- 1.5.2.3 Orang tua, sebagai bukti pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana yang dilakukan di sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pelibatan orang tua murid dalam memonitoring penggunaan sarana dan prasarana sekolah inklusif.
- 1.5.2.4 Peserta didik, sebagai bukti pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana yang dilakukan sekolah untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan dan bergaul seperti anak-anak pada umumnya.

1.6 Definisi Istilah

Definisi istilah untuk memberikan kejelasan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1.6.1** Manajemen Pendidikan merupakan suatu penataan bidang garapan Pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan Pendidikan secara berkualitas.
- 1.6.2** Manajemen sekolah inklusif merupakan kewenangan kepada sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen Pendidikan suatu sekolah yang meliputi siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan Pendidikan dan hubungan antara masyarakat dan sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif.
- 1.6.3** Pendidikan inklusif adalah usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan-hambatan dengan cara-cara yang realistis dan

komprehensif dalam kehidupan Pendidikan yang menyeluruh.

- 1.6.4** Sekolah inklusif adalah sekolah yang menyediakan dan menampung anak-anak berkebutuhan khusus untuk dididik di lingkungan sekolah biasa dengan anak-anak yang normal.
- 1.6.5** Sekolah regular adalah sekolah umum, tidak memuat program tambahan secara khusus di dalamnya.
- 1.6.6** Anak berkebutuhan khusus adalah semua anak yang mengalami gangguan fisik, mental, atau emosi atau kombinasi dari gangguan-gangguan tersebut sehingga membutuhkan Pendidikan khusus dengan guru dan system khusus baik secara permanen maupun secara temporal.
- 1.6.7** Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang mempunyai latar belakang Pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa yang ditugaskan di sekolah inklusif.
- 1.6.8** Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya.
- 1.6.9** Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 1.6.10** Pengadaan adalah serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana Pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- 1.6.11** Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan.
- 1.6.12** Faktor yang menjadi penghambat sarana prasarana di sekolah inklusif SMAN 14 Bandar Lampung adalah masih minimnya dana untuk menunjang kebutuhan sarana prasarana anak berkebutuhan khusus .

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Sekolah Inklusif

2.1.1 Pengertian Manajemen Sekolah Inklusif

Sebelum memberikan batasan pengertian manajemen sekolah inklusif perlu ditegaskan terlebih dahulu mengenai manajemen pendidikan. Menurut Mulyati Siti (2008, p. 88) manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas.

Bidang garapan manajemen pendidikan di Sekolah dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif Depdiknas (2007) adalah (1) bidang garapan peserta didik, (2) bidang garapan tenaga kependidikan, (3) bidang garapan kurikulum, (4) bidang garapan sarana prasarana, (5) bidang garapan keuangan, (6) bidang garapan kemitraan dengan masyarakat, (7) bidang garapan bimbingan dan pelayanan khusus.

Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan sekolah inklusif yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu sekolah inklusif merupakan tempat setiap anak diterima, menjadi bagian dari kelas maupun dengan anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individu dapat terpenuhi.

2.1.2 Fungsi Manajemen

Menurut Terry (2005) Fungsi-fungsi manajemen adalah *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, *Controlling*, sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen, diantaranya yaitu *Planning*, *Organizing*, *Motivating* dan *Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning*, *Organizing*, *Commanding*, *Coordinating*, *Controlling*, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen lainnya tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen pendidikan menurut Hasibuan (2009, p. 88) adalah Perencanaan, Pengorganisasian, Pemotivasian, Pengawasan dan Pengevaluasian. Sedangkan fungsi manajemen menurut Terry dan Hasibuan (2009:38), fungsi-fungsi manajemen dikenal dengan akronim POAC yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pengarahan), dan *controlling* (pengawasan).

Beberapa fungsi manajemen yang disampaikan para ahli, fungsi manajemen yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi manajemen yang disampaikan oleh Terry yang menggunakan 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengontrolan (*controlling*) atau sering disingkat POAC. Dalam usaha atau aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan harus melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Setiap manajer dalam pelaksanaan tugas dan aktivitasnya untuk mencapai tujuan harus melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dari masing-masing fungsi tersebut maka dapat dijelaskan masing-masing fungsi berikut:

a) ***Planning* (Perencanaan)**

Menurut Terry (2010) mengemukakan bahwa Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Koontz dan o'Donnel dalam Hasibuan (2009) perencanaan adalah fungsi seorang manager yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Menurut Mulyati Siti (2008) merencanakan pada dasarnya membuat mengenai arah yang akan dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan diolah dan teknik/metode yang akan dipilih untuk digunakan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Prosedur itu dapat berupa pengaturan sumber daya dan penetapan teknik/metode. Keberadaan suatu rencana sangat penting bagi organisasi karena rencana berfungsi untuk: 1) menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai, 2) memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, 3) organisasi memperoleh sumber daya terbaik dan mendayagunakannya sesuai tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan, 4) menjadi rujukan anggota organisasi dalam melaksanakan aktivitas yang konsisten prosedur dan tujuan, 5) memberikan batas kewenangan dan tanggung jawab bagi seluruh pelaksana, 6) memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara intensif sehingga bisa menemukan dan memperbaiki penyimpangan secara dini, 7) memungkinkan untuk terpeliharanya persesuaian antara kegiatan internal dengan situasi eksternal, 8) menghindari pemborosan. Pada hakekatnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan/tindakan-tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. Proses ini memerlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana dan dimana suatu kegiatan perlu dilakukan serta siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya.

b) *Organizing (Pengorganisasian)*

Menurut Hasibuan (2009) pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang

pada aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sedangkan menurut Terry dalam Hasibuan (2009:40) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Menurut Mulyati Siti (2008) mengorganisasikan berarti: 1) menentukan sumber daya kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan, 3) menugaskan seorang atau kelompok orang dalam suatu tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu, 4) mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan kelewasaan melaksanakan tugas. Fungsi Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, personalia dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama.

c) *Actuating* (Pengarahan)

Menurut Terry dalam Hasibuan (2009) pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan. Oleh karena tindakan-tindakan itu dilakukan oleh orang, maka pengarahan meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada personalia yang melaksanakan perintah-perintah tersebut.

d) **Controlling (Pengawasan atau pengendalian)**

Menurut Koontz dalam Hasibuan (2009:41) pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara. Sedangkan menurut Mulyati dan Komariah (2008:95) pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu: 1) menetapkan standar kinerja, 2) mengukur kinerja, 3) membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan, 4) mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan. Fungsi pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana. Sehingga pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan. Makin jelas makin lengkap serta terkoordinir rencana-rencana makin lengkap pula pengawasan.

Amka (2020) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sarana Sekolah Penyelenggara Inklusi” menyatakan pada umumnya ada empat (4) fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pengarahan (*directing*) dan fungsi pengendalian (*controlling*). Serupa dengan yang dinyatakan Megasari (2014) : (1) Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks, karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional maupun lokal, perencanaan ini merupakan sistem perencanaan terpadu dengan perencanaan pembangunan tersebut. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tergantung pada jenis program pendidikan dan tujuan yang ditetapkan. (2) Pengorganisasian Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana

pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (3). Penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan tanggungjawab kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, bagi kepala sekolah yang mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berhubungan dengan penanganan sarana dan prasarana sekolah diberi tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut. (4) Pengawasan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilai terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.

2.2 Pendidikan Inklusif

2.2.1 Pengertian Pendidikan Inklusif

Banyak pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian inklusif, yang mana inklusif adalah istilah terbaru yang dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program - program sekolah. Bagi sebagian besar pendidik, istilah ini dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara- cara yang realistis dan kompeherensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh (Smith, 2006). Menurut Olsen and Fuller (2008) inklusif merupakan sebuah terminologi yang secara umum digunakan untuk mendidik peserta didik baik yang memiliki kemampuan maupun tidak memiliki kemampuan tertentu di dalam sebuah kelas reguler. Pendidikan inklusif adalah bagian dari nilai-nilai kehidupan. Melalui inklusif kita mencari dan memelihara anugerah yang ada pada setiap orang. Dengan cara ini bisa diyakini bahwa siswa di sekolah inklusif akan terbebaskan dari tirani dengan mendapatkan hak mereka (Kunc, 1992). David Smith mengartikan pendidikan inklusif sebagai penyatuan anak - anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program - program sekolah (Smith, 2006)

Siswa berkebutuhan khusus adalah mereka yang memerlukan pendidikan khusus dan pelayanan terkait, jika mereka menyadari potensi penuh kemanusiaan mereka. Pendidikan khusus diperlukan karena mereka mungkin memiliki salah satu atau lebih hal berikut yaitu: keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar atau gangguan atensi, gangguan emosi atau perilaku, hambatan fisik, hambatan berkomunikasi, autisme, *traumatic brain injury*, hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, atau anak-anak yang berbakat (Kauffman & Hallahan, 1986)

Beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang tergolong luar biasa atau berkebutuhan khusus adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal: ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan *sensorik*, fisik dan *neuromuskular*, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal di atas, sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.

Inklusif mempunyai arti berbeda-beda bagi tiap orang. Diharapkan anak berkelainan atau berkebutuhan khusus dapat dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya melalui pendidikan inklusif ini, agar tidak ada kesenjangan diantara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Selain itu anak dengan kebutuhan khusus diharapkan juga dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya.

Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak-anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman-teman seusianya. Perlu adanya kerjasama yang baik di sekolah sehingga sekolah bisa menjadi lembaga yang mendukung pemenuhan

kebutuhan khusus bagi setiap anak. Selain itu pendidikan inklusif juga diharapkan melibatkan orangtua dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pendidikan, terutama dalam proses perencanaan, sedang dalam proses belajar mengajar pendekatan guru berpusat pada anak.

Keuntungan dari pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus maupun anak normal dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensinya.

Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan perubahan, mulai dari cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi (James, 2007: 51).

2.2.2 Tujuan Pendidikan Inklusif

Tujuan dari pendidikan inklusif disebutkan dalam Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

- a) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a).

2.2.3 Landasan Pendidikan Inklusif

a) Landasan Filosofis

Perubahan pendekatan filosofis pendidikan inklusif menuntut adanya konsep - konsep baru, dengan harapan akan dapat

mengkomunikasikan sikap yang berbeda, diantaranya konsep untuk menempatkan diri anak sebagai pusat perhatian bukan kecacatannya. Konsep lain yang dapat menekankan pada perubahan pendekatan, seperti asismen bukan diagnostik, dan special need education, bukan lagi special education.

Landasan filosofis yang utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila dengan kelima pilar utamanya. satu lambang yaitu “Bhineka Tunggal Ika”, Tarmansyah (2007) mengemukakan filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horisontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Dengan demikian, harusnya perbedaan yang terdapat pada masyarakat bukan menjadi alasan untuk perpecahan bangsa, tetapi harus menjadi pemersatu bangsa pada seluruh aspek kehidupan salah satunya dalam dunia pendidikan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, manusia merupakan subjek dari pembangunan. Untuk tuntutan tersebut, manusia Indonesia dikembangkan menjadi manusia yang utuh, dengan pengembangan segenap dimensi potensinya secara wajar. Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, dapat dilakukan melalui proses pendidikan.

Pelayanan pendidikan harus memperhatikan keragaman potensi individu, apabila layanan pendidikan kurang memperhatikan keberagaman potensi tersebut, bukan saja akan merugikan anak itu sendiri melainkan juga membawa dampak kerugian yang besar bagi perkembangan pendidikan dan percepatan pembangunan nasional.

Tarmansyah (2007: 44) mengemukakan filosofi inklusi adalah adanya perubahan paradigma dalam layanan pendidikan dengan

tidak membeda-bedakan anak secara individu. Mengubah konsep filosofi menuju pendidikan inklusi yaitu merubah pandangan yang semula anak harus menyesuaikan dengan tuntutan sekolah, menjadi sekolah atau sistem yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak.

b) Landasan Yuridis

1. UUD 1945 (Amandemen) Ps. 31: (1) berbunyi ‘Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) ’Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’.
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ps. 5 ayat (1) ‘Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu’. Ayat (2): Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (3) ‘Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus’. Ayat (4) ‘Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus’.

c) Landasan Empiris

1. Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (*Declaration of Human Rights*),
2. Konvensi Hak Anak, 1989 (*Convention on the Rights of the Child*),
3. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990 *World Conference on Education for All*,
4. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif, 1994 *The Salamanca Statement on Inclusive Education*),
5. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua,
6. Deklarasi Bandung (2004) dengan komitmen 2000 “*The Dakar Commitment on Education for All*), 2001 Dan Indonesia menuju pendidikan inklusif”,.

2.2.4 Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Pendidikan inklusif menawarkan jaminan akses dan kualitas bagi para siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Salah satu tujuan utamanya adalah mendidik anak yang berkebutuhan khusus akibat kecacatannya di kelas reguler bersama-sama dengan anak-anak noncacat, dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, di sekolah yang ada di lingkungan rumahnya. Pernyataan Salamanca, Kerangka aksi tentang pendidikan kebutuhan khusus, serta Deklarasi Dakar menjadi dokumen internasional utama yang berisikan tentang prinsip-prinsip dan praktek pendidikan inklusif.

Proses pendidikan inklusif di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1960-an oleh beberapa siswa tunanetra di Bandung dengan dukungan organisasi para tunanetra sebagai kelompok penekan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun Ednis Firdaus (2010) mengemukakan pada masa itu SLB untuk tunanetra hanya memberikan layanan pendidikan hingga tingkat SLTP, setelah itu para tunanetra diberi latihan kejuruan dalam bidang kerajinan tangan atau pijat. Baru pada akhir tahun 1970-an pemerintah mulai menaruh perhatiannya terhadap pentingnya pendidikan integrasi. Pemerintah mengundang Helen Keller International, Inc. untuk membantu mengembangkan pendidikan integrasi ini dan berhasil mencetuskan Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat yang mengatur bahwa anak penyandang cacat yang memiliki kemampuan seyogyanya diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan sebayanya yang noncacat di sekolah biasa. Namun sayangnya setelah proyek tersebut berakhir, pendidikan integrasi kurang begitu diperhatikan implementasinya terutama pada jenjang SD.

Menurut Firdaus (2010) mengemukakan bahwa menjelang akhir tahun 1990-an pemerintah baru mengupayakan melakukan pengembangan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdikbud dengan

pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB. Untuk mengantisipasi kegagalan yang terjadi pada pendidikan integrasi yang hampir mati, maka pada proyek ini perhatian diberikan pada substainabilitas program pengimplementasian pendidikan inklusif.

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007) dalam Sari Rudiwati (2011:11-12), membagi penempatan anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusif di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu: (a) Kelas reguler “Full inclusion”; (b) Kelas reguler dengan cluster; (c) Kelas reguler dengan pull out; (d) Kelas reguler dengan cluster dan pull out; (e) Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian; dan (f) Kelas khusus penuh. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jenis kelas yang telah disebutkan tadi.

a) Kelas reguler “ Full Inclusion”

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif sepanjang hari dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan yang digunakan anak pada umumnya.

b) Kelas reguler dengan cluster

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama

c) Kelas reguler dengan pull out

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang bimbingan/ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus

d) Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler/ inklusif; tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler/inklusif

- e) Kelas khusus penuh anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus di dalam kelas khusus yang ada pada sekolah reguler/inklusif.

2.2.5 Kriteria Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Setiap satuan pendidikan formal, baik TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar, dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap Kecamatan dan 1 (satu) Satuan Pendidikan Menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Permendiknas No 70 Tahun 2009 yaitu; tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya dan tunaganda.

Dalam menghindari kemungkinan terjadinya implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang kurang sesuai, setiap satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu memenuhi beberapa kriteria, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, di dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 2007, menyebutkan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagai berikut:

- a. Terdapat peserta didik berkebutuhan khusus
- b. Kesiapan sekolah
Kesiapan yang dimaksud meliputi:
 - (1) Adanya persepsi dan sikap yang positif dari semua komponen sekolah, termasuk orangtua anak pada umumnya, tentang pendidikan inklusif.
 - (2) Adanya kemauan yang kuat dari sekolah untuk meningkatkan

- pemerataan dan mutu pendidikan tanpa diskriminatif.
- (3) Adanya peluang untuk meningkatkan *aksesibilitas* anak berkebutuhan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan.

2.2.6 Mekanisme Penyelenggaraan Inklusif

Untuk keperluan administrasi dan pembinaan, serta kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu mengikuti prosedur Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, yaitu sebagai berikut:

- a. Sekolah yang akan menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan sekolah yang telah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menindaklanjuti proposal/laporan dari sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan visitasi ke sekolah yang bersangkutan.
- d. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusi dengan menerbitkan surat penetapannya, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

2.2.7 Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif

Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang mengacu pada Peraturan Menteri “Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap Kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)”.

2.2.8 Implementasi/Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Implementasi pendidikan inklusif sangat berkaitan erat dalam manajemen penyelenggara pendidikan inklusif, pihak sekolah memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen - komponen pendidikan inklusif. Komponen komponen tersebut meliputi :

- a) Manajemen kesiswaan, b) Manajemen kurikulum, c) Manajemen Pembelajaran, d) Manajemen Penilaian e) Manajemen ketenagaan, f)

Manajemen sarana prasarana, g) Manajemen Pembiayaan, h) Manajemen sumberdaya lingkungan (Tarmansyah, 2007: 90)

2.3 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

2.3.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Definisi yang fleksibel dalam mendefinisikan anak-anak berkebutuhan tidak hanya meliputi anak-anak berkelainan (*handicapped children*), tetapi juga mereka yang termasuk anak-anak memiliki faktor resiko. Sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa pendapat tentang pengertian Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak-anak yang mengalami kelainan atau ketunaan dalam segi fisik, mental, emosi dan sosial atau gabungan dari hal-hal tersebut sedemikian rupa baik bersifat permanen ataupun temporer sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan ketunaan mereka (Iswari, 2007).

Budiyanto (2005 : 9) menyatakan bahwa anak berkebutuhan pendidikan khusus adalah semua anak yang mengalami gangguan fisik, mental, atau emosi atau kombinasi dari gangguan - gangguan tersebut sehingga membutuhkan pendidikan khusus dengan guru dan sistem khusus baik secara permanen maupun secara temporal.

Dari penjelasan di atas bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang memiliki kelainan atau gangguan dalam dirinya, baik secara fisik, mental hingga psikis yang mengakibatkan anak terganggu atau terhambat dalam pembelajarannya. Sehingga anak berkebutuhan khusus (ABK) membutuhkan pendidikan khusus untuk mengatasi hambatan yang dimilikinya tersebut.

2.3.2 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 70 tahun 2009 terdiri dari : (a) Tunanetra, (b) Tunarungu, (c) Tunawicara, (d) Tunagrahita, (e) Tunadaksa, (f) Tunalaras, (g) Lamban belajar, (h) Berkesulitan belajar, (i) Autis, (j) Tunaganda, (k) Anak

berbakat istimewa, dan (l) Anak korban/pengidap *psikotropika*.

a) Tunanetra

Tunanetra sebagai suatu kondisi yang ada pada seseorang, yaitu hilangnya daya penglihatan untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga untuk menempuh pendidikan harus menggunakan indera pendengaran, perabaan, dan penciuman (Suharmini, 2009: 31). Sedangkan pengertian anak tunanetra itu sendiri adalah individu yang indera penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas (Sutjihati Soemantri, 2006: 94).

b) Tunarungu

Menurut Sutjihati Soemantri (2006 : 94) tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian (*hard of hearing*) maupun seluruhnya (*deaf*) yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Tin Suharmini (2009 : 35) mendefinisikan anak tunarungu sebagai anak yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran, sehingga tidak dapat menangkap dan menerima rangsang suara melalui pendengaran. Jika pendengarannya tidak berfungsi, maka membutuhkan pendidikan khusus. Dari pendapat kedua ahli tersebut diketahui bahwa anak tuna rungu adalah anak yang mengalami gangguan atau kerusakan pada indera pendengarannya, sehingga kehilangan sebagian maupun seluruh kemampuan pendengarannya.

c. Tunawicara

Hallahan & Kauffman (2009) menyatakan gangguan komunikasi meliputi kelainan bicara, kelainan bahasa dan variasi dalam komunikasi (meliputi perbedaan komunikasi/dialek dan produksi suara). Dengan kata lain, tunawicara atau gangguan bicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif, sedemikian rupa sehingga pemahaman akan bahasa yang diucapkan berkurang.

d. Tunagrahita

McLeskey et al. (2017) menyatakan “ *Intellectual disability means*

significantly subaverage general intellectual functioning, existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period, that adversely affects a child's educational performance”.

e. Tunadaksa

Tunadaksa sering diartikan sebagai cacat tubuh atau tuna fisik. Menurut Sutjihati.S (2006), tunadaksa adalah suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri. Anak tunadaksa dapat diartikan sebagai gangguan fisik atau cacat tubuh yaitu ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal sehingga menghambat kegiatan individu.

f. Tunalaras

Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya dan hal ini akan mengganggu situasi belajarnya (Sutjihati Soemantri, 2006 :140).

g. Tunaganda

Anak yang memiliki kelainan lebih dari satu macam, dan merupakan kombinasi dari dua atau lebih kelainan berikut: tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, autisme, tunawicara bahasa (UNESCO, 2009).

2.4 Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Menurut Hairul (2017), mendefinisikan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai suatu aktivitas menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan berbagai properti pendidikan yang dimiliki oleh suatu institusi pendidikan. Pendapat lain dikemukakan oleh (Habibah), menyatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur

dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan.

Definisi lain tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (1987: 80), adalah segenap proses penataan yang berhubungan dengan pengadaan, pendayagunaan, pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen sarana prasarana pendidikan merupakan serangkaian proses pengaturan sarana dan prasarana pendidikan dari mulai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah menurut Prihatin (2011), adalah sebagai berikut.

- a) Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efisien.
- b) Mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien.
- c) Mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah.

Menurut Gunawan (2006:116) secara operasional kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi:

- 1) Perencanaan pengadaan barang.
- 2) Prakualifikasi Rekanan.
- 3) Pengadaan sarana.
- 4) Penyimpanan, Inventarisasi, Penyaluran.

- 5) Pemeliharaan, Rehabilitasi.
- 6) Penghapusan dan Penyingkiran.
- 7) Pengendalian.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang harmonis/terpadu. Dalam sistematika kerjanya harus dihindarkan timbulnya kesimpangsiuran dan tumpang tindih dalam wewenang, tanggung jawab, dan pengawasan menghindari timbulnya pemborosan biaya, tenaga, dan waktu.

Menurut Subagya (1990: 10) dalam bukunya Manajemen Logistik menyebutkan bahwa fungsi-fungsi manajemen sarana dan prasarana terdiri dari:

- 1) Perencanaan kebutuhan barang.
- 2) Penganggaran.
- 3) Pengadaan.
- 4) Penyimpanan dan penyaluran.
- 5) Pemeliharaan.
- 6) Penghapusan.
- 7) Pengendalian.

Adapun di lingkungan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan manajemen (pengelolaan) sarana dan prasarana pendidikan dipandang sebagai suatu rantai. Rantai ini terdiri dari lima mata rantai itu terdapat suatu tonggak yang menghubungkan secara menyebar dengan tiap mata rantai yang bersifat 2 arah, yang juga bersifat cerminan dari fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kebutuhan.
- 2) Proses pengadaan.
- 3) Proses pengiriman.
- 4) Penyempurnaan, pemeliharaan dan pendayagunaan.
- 5) Inventarisasi, monitoring, dan pengendalian. Dari fungsi-fungsi manajemen sarana dan prasarana yang dikemukakan di atas dapat

disimpulkan bahwa fungsi manajemen sarana dan prasarana yang harus dilakukan dalam lingkungan sekolah meliputi:

- 1) Fungsi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- 2) Fungsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
- 3) Fungsi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
- 4) Fungsi penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan.
- 5) Fungsi pengawasan sarana dan prasarana pendidikan.

2.4.1 Perencanaan Sarana dan Prasarana Persekolahan

Menurut Terry (2005) perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Hal senada juga dikemukakan oleh Sudjana (2002) bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, oleh Dwiantara dan Sumarto (2004) dikemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana.

Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

2.4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2007:6) mengatakan bahwa pengadaan merupakan kegiatan untuk menyediakan perlengkapan dalam usaha untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar. Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pembelian.
- 2) Pembuatan Sendiri.
- 3) Pengiriman Hibah atau Bantuan.
- 4) Penyewaan.
- 5) Pinjaman.
- 6) Pendaur ulangan.
- 7) Penukaran.
- 8) Perbaikan atau Rekondisi.

2.4.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Di dalam fungsi pemeliharaan ini, fungsi pendayagunaan termasuk di dalamnya. Menurut Subagya (1990) pemeliharaan adalah usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis dan daya guna suatu alat produksi fasilitas kerja dengan jalan merawat, memperbaiki, merehabilitasi dan menyempurnakan.

Berdasarkan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2007:31) definisikan pemeliharaan adalah: Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan agar kondisi barang tetap dalam keadaan baik atau siap dipakai dan dapat bertahan lama, sehingga dapat menghemat pengeluaran anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. pemeliharaan sehari-hari dilakukan oleh pegawai yang menggunakan barang-barang tersebut dan bertanggung jawab atas barang tersebut. dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya

2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan sebagainya. Pelaksanaan pemeliharaan dapat dilakukan sendiri dan dengan pihak kedua. Adapun tujuan dan manfaat dari pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Tujuan pemeliharaan

mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut.

- a) menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal.
- b) menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur.
- c) menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut.

2) Manfaat pemeliharaan:

- a) Jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat.
- b) Pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminim mungkin.
- c) Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang.
- d) Pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik.

Apabila ditinjau dari waktu perbaikannya, ada dua macam pemeliharaan perlengkapan sekolah, yaitu pemeliharaan

sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan sehari-hari misalnya, berupa menyapu, mengepel lantai, dan membersihkan pintu. Sedangkan pemeliharaan berkala, misalnya pengontrolan genting dan pengapuran tembok (Bafadal, 2008:49).

Pemeliharaan dilakukan secara kontinu terhadap semua barang-barang inventarisasi. Pemeliharaan barang inventaris kadang-kadang dianggap sebagai suatu hal yang sepele, padahal sebenarnya pemeliharaan ini merupakan tahap kerja yang tidak kalah pentingnya dengan tahap-tahap yang lain dalam administrasi sarana dan prasarana.

Pemeliharaan mencakup segala upaya yang terus menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud.

Ada beberapa macam pemeliharaan perlengkapan pendidikan di sekolah, ditinjau dari sifatnya, ada empat macam pemeliharaan perlengkapan pendidikan. Keempat pemeliharaan tersebut cocok dilakukan pada perlengkapan pendidikan berupa mesin, Pertama, pemeliharaan yang bersifat pengecekan, Kedua, pemeliharaan yang bersifat pencegahan, Ketiga, pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan, Keempat, pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat (Bafadal, 2003:49).

2.4.4. Pengawasan Sarana dan Prasarana

Fungsi penghapusan, penyingkiran, pengendalian, dan rehabilitasi masuk ke dalam fungsi pengawasan. Kegiatan pengawasan dapat berupa melaksanakan pengamatan, evaluasi dan meminta laporan untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang keadaan atau perlengkapan. Selain itu pengawasan dapat pula berupa pemberian pengarahan dan bimbingan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dilakukan dalam satu periode untuk mencapai tertib administrasi dan tertib teknis.

Wijono (1989: 7) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian seperti disusun serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengikuti proses manajemen, dari perencanaan sampai penghapusan. Mengadakan konsultasi dengan pihak pemimpin bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan.
- 2) Menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tertulis.
- 3) Mengadakan konsultasi dengan pihak pelaksanaan fungsi masing-masing bila terjadi penyimpangan yang bersifat teknis.
- 4) Mengadakan koordinasi antara fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi lainnya.
- 5) Menyusun laporan menyeluruh secara periodik tentang pelaksanaan proses manajemen yang terjadi dalam masing-masing unit.
- 6) Keseluruhan proses di atas dilakukan untuk mencegah adanya penyelewengan dan kesalahan dalam pelaksanaan prosedur manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Maka dari itu diadakan kegiatan

penghapusan, setelah kegiatan penghapusan selesai, proses selanjutnya menginformasikan kebutuhan sarana dan prasarana yang bersangkutan untuk kemudian dilakukan kegiatan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Di samping itu kegiatan penyusutan terhadap barang atau sarana di dalam fungsi pengawasan sangatlah perlu dilakukan, dikarenakan penyusutan barang penting jika sekolah akan menambah pengadaan barang, yang sering terjadi adalah kekurangan tempat penyimpanan. Penyusutan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memusnahkan barang yang sudah tidak dipakai lagi sehingga tempatnya masih dapat dimanfaatkan. Untuk mengatasi masalah tersebut kepala sekolah perlu mempertimbangkan adanya tindakan penyusutan barang. Kegiatan pengaturan, pemeliharaan dan penyusutan sarana pendidikan yang merupakan bagian dari pengelolaan sarana dan prasarana haruslah selalu dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar sarana pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Adapun penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk:

- 1) Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi.
- 2) Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris.
- 3) Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi.
- 4) Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja.

Berdasarkan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2007: 52) mengatakan bahwa kegiatan penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Dalam pengawasan (*Controlling*) menurut Terry adalah pengawasan yaitu kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan maka diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana (Budiyanto & 9., 2005).

Sehingga dalam hal ini hambatan dalam manajemen sarana dan prasarana masuk dalam pengawasan. Sehingga dengan mengetahui hambatannya mampu memberikan solusi dan jalan keluarnya untuk mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

2.4.5 Konsep Sarana dan Prasarana Pendidikan

Menurut Sukirman, dkk (1999: 28) sarana pendidikan adalah suatu sarana penunjang bagi proses pembelajaran baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien, termasuk di dalamnya barang habis pakai maupun yang tidak habis pakai. Selain itu Dirjen Dikdasmen Depdikbud (1997: 134), mengemukakan bahwa sarana pendidikan sering diartikan dengan semua fasilitas yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat lain yang dikemukakan oleh Prasjojo (2005:2), sarana dan prasarana pendidikan merupakan fasilitas pendidikan yang sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Pendapat lain dikemukakan oleh Susilo (2008; 65), sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar, adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran.

Beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana prasarana pendidikan merupakan segala jenis fasilitas baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang mendukung proses pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

Kemudian menurut Suryosubroto (1988:8), sarana pendidikan digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pendidikan. pendapat tersebut menekankan bahwasanya sarana pendidikan terkait langsung dengan fasilitas yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pada proses pembelajaran di sekolah secara lebih efektif dan efisien sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih baik dan tujuan pendidikan dapat tercapai.

Pengertian lain tentang sarana pendidikan dapat ditinjau dari sisi kedekatannya dengan proses pembelajaran, sarana pendidikan menurut Arikunto (1987: 10) adalah segala sesuatu yang berhubungan secara langsung dengan proses pembelajaran, antara lain: perabotan, buku, alat tulis, dan sebagainya. Apabila kita berbicara tentang sarana pendidikan, maka erat kaitannya dengan prasarana pendidikan, yaitu segala sesuatu yang tidak berhubungan secara langsung dengan proses pembelajaran antara lain bangunan sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, lapangan, kebun sekolah, dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan merupakan segala sesuatu berbentuk benda atau peralatan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran dan berfungsi sebagai penunjang pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan benda-benda yang tidak secara langsung terkait dalam proses pembelajaran namun menunjang pencapaian tujuan pendidikan merupakan pengertian dari prasarana pendidikan.

2.4.6 Fungsi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat baik buruknya baik secara kualitas maupun kuantitas dapat ditinjau dari berfungsi tidaknya sarana dan prasarana pendidikan pada proses pembelajaran. Menurut Disdasmen Depdikbud (1997:7), bahwa fungsi sarana pendidikan yang berupa alat pembelajaran, alat peraga, dan media pendidikan dalam proses pembelajaran sangat penting guna mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas sehingga berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Sarana pendidikan yang lengkap dapat memudahkan guru dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswanya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Budiningsih (1995:74), bahwa alat pembelajaran dapat berfungsi sebagai alat penghubung pemahaman anak didik dari konsep kongkrit ke abstrak. Sarana pendidikan dapat menjembatani siswa untuk bisa lebih memahami tentang konsep pelajaran yang dijelaskan oleh guru.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan mempunyai fungsi, antara lain: (a) sebagai alat yang dapat memperlancar penyampaian informasi pembelajaran dari guru ke siswa, (b) sebagai alat untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep pembelajaran, (c) sebagai alat untuk memperlancar proses pembelajaran, dan (d) sebagai penghubung pemahaman siswa dari konsep kongkrit ke abstrak.

2.4.7 Jenis sarana dan prasarana pendidikan

Jenis-jenis Sarana Prasarana Pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan . Adapun prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu

- (1) habis tidaknya dipakai;
- (2) bergerak tidaknya pada saat digunakan;
- (3) hubungannya dengan proses belajar mengajar.

2.4.8 Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana Pendidikan

Menurut Prihatin (2011: 57), prasarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam prasarana pendidikan.

- 1) Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, ruang laboratorium.
- 2) Prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk

proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantor sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha, kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah dan tempat parkir kendaraan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Bafadal (2004: 14), menyatakan bahwa media pengajaran yang perlu disediakan untuk kepentingan efektifitas proses belajar mengajar di kelas dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Media pandang diproyeksikan, misal projector opaque, overhead projector, slide, projector filmstrip.
- 2) Media pandang tidak diproyeksikan, misal gambar diam, grafis, model, dan benda asli.
- 3) Media dengar, misal piringan hitam, tape recorder, pita kaset, dan radio.
- 4) Media pandang dengar, misal televisi dan film.

Dirjen Dikdasmen Depdikbud (1997: 14), menjelaskan bahwa sarana pendidikan ditinjau dari fungsinya dapat dikelompokkan menjadi empat macam yang secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Sarana fisik sekolah meliputi: (a) bangunan sekolah, yang terdiri dari ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, dan lain-lain; (b) perabot sekolah, meliputi: kursi, meja belajar, meja kerja, buku induk siswa, buku rapor, alat tulis, dan alat kantor lainnya.
- 2) Media pendidikan meliputi: (a) perangkat keras atau hardware, yaitu segala jenis alat penampilan elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan dalam kegiatan pembelajaran, meliputi: OHP, tape recorder, televisi, komputer, dan lain sebagainya; (b) perangkat lunak atau software, yaitu segala jenis atau materi pelajaran yang disampaikan melalui alat penampil dalam kegiatan pembelajaran.
- 3) Alat peraga meliputi: (a) alat peraga yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran sebagai sarana penjelas dan memvisualisasikan konsep, ide atau pengertian tertentu yang terdiri dari: gambar-gambar anatomi, rangka badan, diagram, globe, peta, dan lain sebagainya; (b) alat

praktek yaitu alat yang berfungsi sebagai sarana untuk berlatih mencapai keterampilan tertentu.

- 4) Perbukuan sekolah meliputi macam-macam buku yang dipergunakan dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prasarana pendidikan bila dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi prasarana pendidikan secara langsung dan prasarana pendidikan secara tidak langsung. Sedangkan sarana pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan.

2.4.9 Kegiatan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Menurut Suryosubroto (2004), secara garis besar manajemen sarana dan prasarana meliputi lima hal, yakni: (a) penentuan kebutuhan; (b) proses pengadaan; (c) pemakaian; (d) pengurusan dan pencatatan; dan (e) pertanggungjawaban. Pendapat lain dikemukakan oleh Wahyuningrum (2000), proses manajemen fasilitas dimulai dari kegiatan perencanaan dan prakualifikasi, pengadaan fasilitas, penyimpanan, penyaluran dan penggunaan barang, inventarisasi, pemeliharaan fasilitas, pengendalian, rehabilitasi dan penghapusan. Dari kedua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dimulai dari proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, inventarisasi, pemeliharaan, pengendalian, dan penghapusan.

a. Perencanaan dan Analisis Kebutuhan

Sarana dan prasarana pendidikan perlu dirancang dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan di sekolah. Menurut Prihatin (2011: 58), perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks, karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional, maupun lokal. Perencanaan yang dimaksud mencakup perencanaan

pengadaan tanah untuk gedung/ bangunan sekolah, perencanaan pengadaan bangunan, perencanaan pembangunan bangunan, dan perencanaan pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan. Bafadal (2003: 27), menyebutkan ada beberapa karakteristik esensial dalam perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah, yaitu.

- 1) Perencanaan perlengkapan sekolah itu merupakan proses menetapkan dan memikirkan.
- 2) Objek pikir dalam perencanaan perlengkapan sekolah adalah upaya memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah.
- 3) Tujuan perencanaan perlengkapan sekolah adalah efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan perlengkapan sekolah.
- 4) Perencanaan perlengkapan sekolah harus memenuhi prinsip-prinsip:
 - a) perencanaan perlengkapan sekolah harus betul-betul merupakan proses intelektual;
 - b) perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi komprehensif mengenai masyarakat sekolah dan kemungkinan pertumbuhannya, serta prediksi populasi sekolah;
 - c) perencanaan perlengkapan sekolah harus realistis, sesuai dengan kenyataan anggaran; dan
 - d) visualisasi hasil perencanaan perlengkapan sekolah harus jelas dan rinci, baik jumlah, jenis, merek, dan harganya.

Pendapat lain disampaikan oleh Hartanti (2021) bahwasanya dalam melaksanakan perencanaan memerlukan tahapan sebagai berikut.

- 1) Mengadakan analisis terhadap materi pelajaran mana yang membutuhkan alat atau media dalam penyampaianya.
- 2) Apabila kebutuhan yang diajukan oleh guru ternyata melampaui kemampuan daya beli atau daya pembuatan, maka harus diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat yang mendesak pengadaannya.

- 3) Mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada.
- 4) Mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran/media yang masih dapat dimanfaatkan, baik dengan reparasi atau modifikasi maupun tidak.
- 5) Mencari dana apabila belum ada.
- 6) Menunjuk bagian pengadaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pengadaan.

b. Pengadaan

Pengadaan fasilitas merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan semua keperluan barang/benda/jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan fasilitas dapat berupa: tanah, bangunan, perabot, alat kantor/buku, dan kendaraan. Setiap jenis fasilitas memiliki cara pengadaan yang berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Prihatin (2011: 59), bahwa dalam pengadaan gedung/ bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun baru, membeli, menyewa, menerima hibah dan menukar bangunan. Untuk pengadaan perlengkapan atau perabot dapat dilakukan dengan jalan membeli. Pendapat lain dikemukakan oleh Wahyuningrum (2000: 11), adalah sebagai berikut.

- 1) Pengadaan tanah, caranya dengan membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan menukar.
- 2) Pengadaan bangunan, caranya dengan membangun baru, membeli, menyewa, dan menerima hibah.
- 3) Pengadaan perabot, caranya dengan membeli, membuat sendiri, menerima bantuan, dan menyewa.
- 4) Pengadaan alat kantor, caranya dengan membeli secara serentak, membeli sendiri, dan menerima bantuan/ hibah/ hadiah.

c. Inventarisasi

Menurut Wahyuningrum (2000: 25), bahwasanya kegiatan inventarisasi adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun

barang-barang/ bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara (atau swasta).

Kegiatan dalam inventarisasi barang meliputi kegiatan klasifikasi dan kode barang inventarisasi serta pelaksanaan inventarisasi itu sendiri.

Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah dalam proses pencatatan dan penemuan kembali barang-barang yang diinventaris. Kode barang biasanya berjumlah tujuh digit angka yang terpisah menjadi tiga angka di depan dan empat angka di belakang yang dipisahkan dengan titik. Tiga angka di depan menyatakan jenis formulir atau kode golongan barang dan sandi/ kode pokok untuk kelompok barang, sedangkan empat angka dibelakang titik menunjukkan kelompok barang serta nomor urut barang.

Pelaksanaan inventaris dilakukan pada dua buku pokok yaitu buku induk inventaris dan buku golongan inventaris. Buku induk inventaris berisi semua catatan tentang barang-barang inventaris yang dimiliki oleh suatu organisasi yang dimulai dari awal permulaan, sampai dengan tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan pengadaan barang. Sedangkan buku golongan inventaris merupakan penjabaran dari buku induk yang dalam pencatatannya sudah dibedakan menurut jenisnya masing-masing, seperti inventaris kendaraan, inventaris tanah, bangunan, dan lain sebagainya.

d. Penggunaan

sukirman (2002) mengemukakan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan maka setiap alat perlengkapan perlu diatur penggunaannya seoptimal mungkin. Khususnya buku-buku,

alat peraga, dan/atau alat pelajaran lain, guru mata pelajaran agar menyusun program penggunaan alat dikaitkan dengan program pembelajaran. Dalam upaya peningkatan proses belajar mengajar guru/ dan atau pengguna lain di sekolah, perlu membuat program penggunaan alat pelajaran secara efisien dan efektif di samping juga ikut aktif dalam perencanaan pengadaannya.

Menurut Prihatin (2011: 61), yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana adalah:

- 1) Penyusunan jadwal penggunaan harus dihindari benturan dengan kelompok lainnya.
- 2) Hendaklah kegiatan-kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas pertama.
- 3) Waktu/ jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun ajaran.
- 4) Penugasan/ penunjukkan personil sesuai dengan keahlian pada bidangnya, misal: petugas laboratorium, perpustakaan, operator komputer, dan sebagainya.
- 5) Penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah, antara kegiatan intra kulikuler dengan ekstra kulikuler harus jelas.

e. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan fasilitas diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 057/M/1978 secara fungsional tanggung jawab pengelolaan pemeliharaan barang/ fasilitas diserahkan seluruhnya kepada unit masing-masing. Menurut Wahyuningrum (2000: 31), pemeliharaan perlengkapan adalah suatu kegiatan pemeliharaan yang terus menerus untuk mengusahakan agar setiap jenis barang tetap berada dalam keadaan baik dan siap pakai. Pendapat lain dikemukakan oleh Samani, dkk. (2009: 105), perawatan adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga agar peralatan dalam keadaan siap pakai atau

memperbaiki peralatan sampai kondisi dapat bekerja kembali. agar barang- barang yang dimiliki dapat terpelihara dengan baik, maka perlu dilakukan perawatan secara preventif.

Samani (2011), mendefinisikan program perawatan preventif sebagai suatu tindakan perawatan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik sekolah, seperti gedung, mebeleur, dan peralatan sekolah lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah.

Selanjutnya Samani (2011), menjelaskan bagaimana melaksanakan program perawatan preventif di sekolah, yaitu sebagai berikut.

- 1) Berikan arahan kepada tim pelaksana perawatan preventif dan adakan kaji ulang terhadap program yang telah dilaksanakan secara teratur.
- 2) Mengupayakan pemantauan ke lokasi tempat sarana dan prasarana, untuk mengevaluasi aktivitas pelaksanaannya berdasarkan jadwal yang telah direncanakan.
- 3) Menyebarluaskan informasi tentang program perawatan preventif untuk seluruh warga sekolah, terutama untuk guru dan siswa.
- 4) Membuat program lomba perawatan terhadap sarana dan fasilitas sekolah untuk memotivasi warga sekolah.

f. Pengendalian

Seluruh kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam pelaksanaannya tidak dapat lepas dari proses monitoring atau pengendalian. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga setiap proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana pembelajaran ini selalu berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sehingga efektifitas dan efisiensi sumber daya dapat

tercapai. Namun demikian Wahyuningrum (2000: 37), berpendapat bahwa pengendalian bukan merupakan peraturan yang kaku dan akan sangat membatasi ruang gerak masing- masing fungsi pengelolaan, tetapi agar merupakan koordinasi serta akselerasi (percepatan) bagi seluruh fungsi pengelolaan/ administrasi, sehingga pemborosan tenaga, waktu dan biaya dapat dihindarkan.

g. Penghapusan

Penghapusan barang milik negara menurut Bafadal (2014), secara definitif, penghapusan perlengkapan adalah kegiatan meniadakan barang- barang milik lembaga (bisa juga sebagai milik negara) dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut PP No. 38 Tahun 2008 pasal 1, penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Tujuan penghapusan menurut Bafadal (2014), sebagai salah satu aktivitas dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah, penghapusan bertujuan untuk:

- 1) mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk pemeliharaan atau perbaikan perlengkapan yang rusak;
- 2) mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi;
- 3) membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan; dan
- 4) meringankan beban inventarisasi.

- C. Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus
- Sebagai salah satu penunjang keberhasilan suatu proses pendidikan, maka keberadaan sarana dan prasarana bagi siswa ABK sangat diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan inklusif di suatu sekolah. Sarana prasarana penunjang tersebut harus disesuaikan dengan masing-masing jenis kebutuhan anak. ABK dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu: (1) tunanetra; (2) tunarungu; (3) tunadaksa; (4) tunagrahita; (5) tunalaras; (6) anak berbakat; (7) anak berkesulitan belajar; dan (8) autisme.

Ke delapan golongan tersebut, tidak semua golongan membutuhkan sarana dan prasarana khusus dalam proses pendidikannya. Beberapa golongan yang memerlukan sarana dan prasarana penunjang bagi proses belajarnya adalah sebagai berikut.

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Anak Tunanetra

a. Klasifikasi anak dengan gangguan penglihatan

WHO mengklasifikasikan orang dengan gangguan penglihatan ke dalam lima kategori (Yosfan Azwandi, 2007: 109-108), yaitu.

Kategori 1 : rabun atau penglihatan kurang dari 30/60

Kategori 2 : rabun, ketajaman penglihatan kurang dari 6/60

Kategori 3 : buta, ketajaman penglihatan kurang dari 1/60

Kategori 4 : buta, ketajaman penglihatan kurang dari 1/60 dan lapang pandang kurang dari 5 derajat

Kategori 5 : buta dan tidak ada persepsi sinar

Dengan demikian anak dengan gangguan penglihatan dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu kategori normal, *low vision* (keterbatasan penglihatan), keterbatasan berat, dan buta total.

b. Media pembelajaran anak dengan gangguan penglihatan

1) Klasifikasi media pembelajaran anak buta total

Menurut Azwandi (2007:122), anak buta total tidak dapat memanfaatkan semua jenis media pembelajaran yang ada di sekolah umum.

Media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh anak buta total adalah sebagai berikut.

- a) Media berbasis manusia, termasuk di dalamnya guru, instruktur, kelompok.
- b) Media berbasis cetak, termasuk di dalam kategori ini buku-buku braille dan lembaran-lembaran lepas braille.
- c) Media berbasis taktual, termasuk di dalamnya buku Braille, bagan timbul, grafik timbul, denah, peta timbul, miniatur, dan benda tiruan.
- d) Media berbasis audio, termasuk di sini rekaman suara dengan kaset, rekaman dengan CD/ piringan, radio, tape, dll.
- e) Media berbasis komputer, termasuk di dalamnya perangkat keras komputer, display Braille, program JAWS, perpustakaan Braille online.
- f) Media yang berbasis benda asli dan lingkungan; benda-benda di sekitar lingkungan sosial dan lingkungan alam.

2) Klasifikasi media pembelajaran anak Low-Vision

Meskipun anak low-vision tidak separah anak buta total, namun tetap saja masih memiliki keterbatasan yang signifikan dalam hal rentangan dan jenis pengalaman. Anak low-vision masih mungkin memanfaatkan sebagian besar media pembelajaran yang ada di sekolah umum. Azwandi (2007: 134-137) mengemukakan media pembelajaran yang digunakan oleh anak low- vision adalah sebagai berikut.

- a) Media berbasis manusia, yang termasuk di dalamnya adalah guru, instruktur, tutor, main peran, dan kegiatan kelompok.

- b) Media berbasis cetak, yang termasuk di dalamnya adalah buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Dalam segi tulisan dapat menggunakan tulisan yang dibaca oleh anak awas dengan bantuan lensa pembesar.
 - c) Media berbasis visual, yang termasuk di dalamnya adalah buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, Close Circuit Television (CCTV) transparansi, slide dan benda tiruan (minitur).
 - d) Media berbasis audio visual, yang termasuk di dalamnya seperti video, film, program slide-tape, dan televisi.
 - e) Media berbasis komputer, dengan penggunaan komputer yang telah diinstal aplikasi JAWS (Job for Access with Speech).
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi Anak Autis

a. Pengertian Anak Autis

Menurut Azwandi (2007:145) mengemukakan bahwa autis merupakan gangguan proses perkembangan neurobiologis berat yang terjadi dalam tiga tahun pertama kehidupan. Hal ini menyebabkan gangguan pada bidang komunikasi, bahasa, kognitif, sosial dan fungsi adaptif, sehingga menyebabkan anak-anak tersebut seperti manusia “aneh” yang seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari autistik adalah: a) dampak dari segi interaksi sosial; b) dampak dari segi komunikasi dan pola bermain; c) dan dampak dari segi aktifitas dan minat. Keterbatasan yang dimiliki oleh anak autisme yang disebutkan oleh Azwandi (2007: 149-152) adalah: gangguan kognitif; gangguan pada perilaku motorik; reaksi terhadap perangsangan indera; gangguan tidur dan makan; gangguan afek dan mood serta emosi; perilaku yang membahayakan diri sendiri; dan gangguan kejang.

b. Klasifikasi media pembelajaran anak autisme

1. Media berbasis manusia, dalam hal ini meliputi guru kelas, guru pembimbing khusus, guru mata pelajaran, guru pendamping (shadow), dan anggota kelompok.
2. Media berbasis cetakan, dalam hal ini meliputi buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas.
3. Media visual, hal yang paling penting dalam melaksanakan pembelajaran dengan anak autisme adalah dengan menjaga kontak mata. media visual yang dimaksud meliputi gambar, lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda.
4. Media berbasis audio-visual, dalam hal ini meliputi video, film, program slide-tape, dan televisi.
5. Media berbasis benda nyata, dalam hal ini merupakan benda-benda asli dan benda tiruan yang tergolong dalam benda tiga dimensi.
6. Media komputer, dalam hal ini komputer yang digunakan oleh anak autisme adalah komputer yang telah dilengkapi dengan program Computer-Assisted Instruction (CAI).

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar

Pada dasarnya anak berkesulitan belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kesulitan belajar pra-akademik dan kesulitan belajar akademik. Menurut Yusuf (2005) dalam buku “ Media Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus” (2007: 179-182), yang tergolong kesulitan belajar pra-akademik adalah: a) gangguan motorik dan persepsi (dispraksia); b) kesulitan belajar kognitif; c) gangguan perkembangan bahasa (disfasia); dan d) kesulitan dalam penyesuaian perilaku sosial. Sedangkan yang termasuk dalam kesulitan belajar akademik adalah: a) kesulitan belajar membaca (disleksia); b) kesulitan belajar menulis (disgrafia); dan kesulitan belajar berhitung (diskalkulia).

Klasifikasi media pembelajaran anak berkesulitan belajar yang dikemukakan oleh Azwandi (2007: 218-225) adalah sebagai berikut.

- a. Media berbasis manusia, dalam hal ini meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, dan anggota kelompok/teman sebaya.
- b. Media berbasis cetakan, dalam hal ini meliputi buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Dalam buku teks mengandung enam elemen yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong.
- c. Media berbasis visual, dalam hal ini adalah media bentuk geometri (bangun datar dan bangun ruang), media gambar, media bentuk kartu, media berbentuk huruf dan angka, media puzzle, pias kata, papan pasak, papan bentuk (block design), miniatur, model, papan tulis, over Head Projector, dsb.
- d. Media berbasis audio visual, dalam hal ini adalah seluruh media audio visual yang dapat menunjukkan sesuatu yang dapat menarik perhatian semua siswa.
- e. Media berbasis benda asli (alamiah), dalam hal ini berupa lingkungan fisik dan sosial.
- f. Media berbasis komputer, dalam hal ini komputer yang digunakan oleh anak autisme adalah komputer yang telah dilengkapi dengan program Computer-Assisted Instruction (CAI).

Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 148) menyebutkan ada tiga jenis kesulitan belajar akademik, yaitu kesulitan belajar membaca (disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), dan kesulitan belajar matematika (diskalkulia). Masing-masing jenis kesulitan tersebut memerlukan media yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Kesulitan belajar membaca memerlukan kebutuhan khusus

meliputi: kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat.

- b. Kesulitan belajar menulis memerlukan kebutuhan khusus meliputi: kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat, balok bilangan 1, balok bilangan 2.
- c. Kesulitan belajar matematika memerlukan kebutuhan khusus meliputi: balok bilangan 1, balok bilangan 2, pias angka, kotak bilangan, papan bilangan.

4. Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi Anak Tunarungu

Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 132-135) menyebutkan ada empat jenis peralatan yang digunakan untuk membantu siswa tunarungu dalam proses pembelajaran yaitu hearing aids (alat bantu dengar), peralatan latihan bina persepsi bunyi dan irama, peralatan pembelajaran akademik, dan peralatan latihan fisik.

a. Hearing Aids (Alat Bantu Dengar)

Alat bantu dengar merupakan alat yang digunakan untuk membantu anak yang mengalami gangguan pendengaran ringan, berat atau total. Beberapa jenis alat bantu dengar yang dapat digunakan secara individu adalah sebagai berikut:

- 1) Model saku
- 2) Model belakang telinga
- 3) Model dalam telinga
- 4) Modelacamata

Selain ke empat model tersebut, ada dua jenis alat bantu dengar yang juga dapat digunakan secara berkelompok dalam proses pembelajaran di sekolah yaitu:

- 1) Hearing group, alat bantu dengar yang dapat dipergunakan secara kelompok agar anak dapat berkomunikasi dan memanfaatkan sisa pendengarannya.
- 2) Loop induction system, alat bantu dengar yang dapat dipergunakan secara kelompok agar anak dapat berkomunikasi dan memanfaatkan pendengaran dilengkapi dengan headset.

b. Peralatan Latihan Bina Persepsi Bunyi dan Irama

Beberapa jenis peralatan bina persepsi bunyi dan irama yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran bagi siswa tunarungu yaitu: (1) cermin sebagai alat yang dapat memantulkan gambar; (2) alat latihan meniup; (3) alat musik perkusi; (4) sikat getar; (5) lampu aksen; (6) meja latihan wicara; (7) speech and sound simulation; dan (8) spatel.

c. Peralatan Pembelajaran Akademik

Anak tunarungu memiliki gangguan dalam sistem pendengarannya sehingga anak tersebut kesulitan dalam memahami sesuatu yang bersifat abstrak, yang biasanya berkaitan dengan bidang studi matematika, sains, maupun bidang studi lainnya yang memiliki tingkat pemahaman abstraksi tinggi. Untuk itu perlu adanya peralatan yang dapat membantu anak memahami benda abstrak dalam proses pembelajarannya. Peralatan tersebut yaitu: (1) miniatur benda; (2) finger alphabet; (3) silinder; (4) kartu kata; (5) kartu kalimat; (6) berbagai jenis menara; (7) peta dinding; (8) model geometri; (9) anatomi telinga; (10) model telinga; (11) torso setengah badan; (12) berbagai jenis puzzle; (13) atlas; (14) miniatur rumah adat; dan (15) miniatur rumah ibadah.

d. Peralatan Latihan Fisik

Siswa tunarungu juga memerlukan latihan fisik/ motorik dalam proses pembelajarannya. Pada dasarnya semua jenis sarana olahraga dapat digunakan untuk melatih motorik anak tunarungu. Selain itu power rider (alat untuk melatih kecekatan motorik) dan static bicycle (sepeda statis) juga dapat digunakan untuk melatih motorik anak.

5. Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi Anak Tunagrahita

Anak tunagrahita memiliki tingkat kecerdasan yang bervariasi mulai dari ringan sampai berat. Kondisi tersebut dapat

mengakibatkan anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam mengenali atau membedakan bentuk dan warna. Untuk itu perlu adanya beberapa peralatan yang dapat membantu anak tunagrahita untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 136-141) menyebutkan ada berbagai macam peralatan yang dapat digunakan oleh anak tunagrahita yaitu:

- a. Peralatan latihan sensori visual, seperti gradasi kubur, gradasi balok I dan II, silinder 1, 2, dan 3, aneka puzzle, bok sortir warna, geometri tiga dimensi, kotak geometri, dan puzzle set.
- b. Peralatan latihan sensori perabaan, seperti keping raba I, II, dan III, alas raba, siluet tangan dan kaki, dan tactila.
- c. Peralatan sensori pengecap dan peraba, seperti gelas rasa, botol aroma, tactile perception, dan aesthesiometer.
- d. Peralatan latihan bina diri, contohnya seperti cara berpakaian, dressing frame sets, dan peralatan menyikat gigi.
- e. Peralatan konsep dan simbol bilangan, seperti keping pecahan, balok bilangan I dan II, geometri tiga dimensi, abacus, papan bilangan, tiang bilangan, dan kotak bilangan.
- f. Peralatan pengembangan kreativitas, daya pikir dan konsentrasi, contohnya seperti tetris, bok konsentrasi mekanis, puzzle konstruksi, rantai persegi, rantai bulat, dan lego/ lazi.
- g. Peralatan pengajaran bahasa, seperti alphabet loweincase, alphabet fiber box, pias kata, dan pias kalimat.
- h. Peralatan latihan perseptual motor, seperti bak pasir, papan keseimbangan, gradasi papan titian, tubuh dalam bentuk bertingkat, keping keseimbangan, dan power rider.

2.4.10 Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan inklusif

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebaiknya dapat menyediakan akses bagi siswa berkebutuhan khusus salah satunya dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Setiap

kekhususan memiliki kebutuhanyang berbeda-beda terhadap sarana pembelajaran yang digunakannya. Peraturan Walikota Yogyakarta No.47 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta pada pasal 15 menyebutkan bahwa satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi harus menyediakan sarana, prasarana, media dan sumber pembelajaran yang aksesibel untuk semua termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus.

Dalam Materi Pelatihan Pengawas Sekolah tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif disebutkan bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana disekolah inklusi yaitu aksesibilitas fisik dan materi pembelajaran.

Aksesibilitas fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat masuk, menggunakan, serta keluar dari satu bangunan. Sedangkan beberapa materi belajar dan mengajar telah dirancang khusus untuk keperluan anak berkebutuhan khusus dan sebagian rancangan berupa instrument pembelajaran sederhana yang dapat dibuat sendiri oleh guru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sekolah inklusi tidak memiliki standar khusus untuk sarana dan prasarana pendidikan karena tidak semua sekolah memiliki siswa dengan kekhususan yang sama, sehingga sekolah hanya disarankan untuk memberikan aksesibilitas fisik dan menyediakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kekhususan dari masing-masing siswa di sekolah.

2.5 Kerangka Pikir

Pendidikan inklusif merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk mempromosikan pendidikan untuk semua yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Sehingga pendidikan inklusif dapat menjamin ketersediaan akses dan kualitas.

Tujuan utama pendidikan inklusif adalah untuk mendidik anak yang

berkebutuhan khusus di kelas reguler bersama-sama dengan anak-anak lain yang normal dan diberi dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, di sekolah yang ada di lingkungan rumahnya. Secara mendasar konsep dan praktek penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi ABK di berbagai belahan dunia saat ini mengacu kepada Deklarasi Bandung tahun 2004.

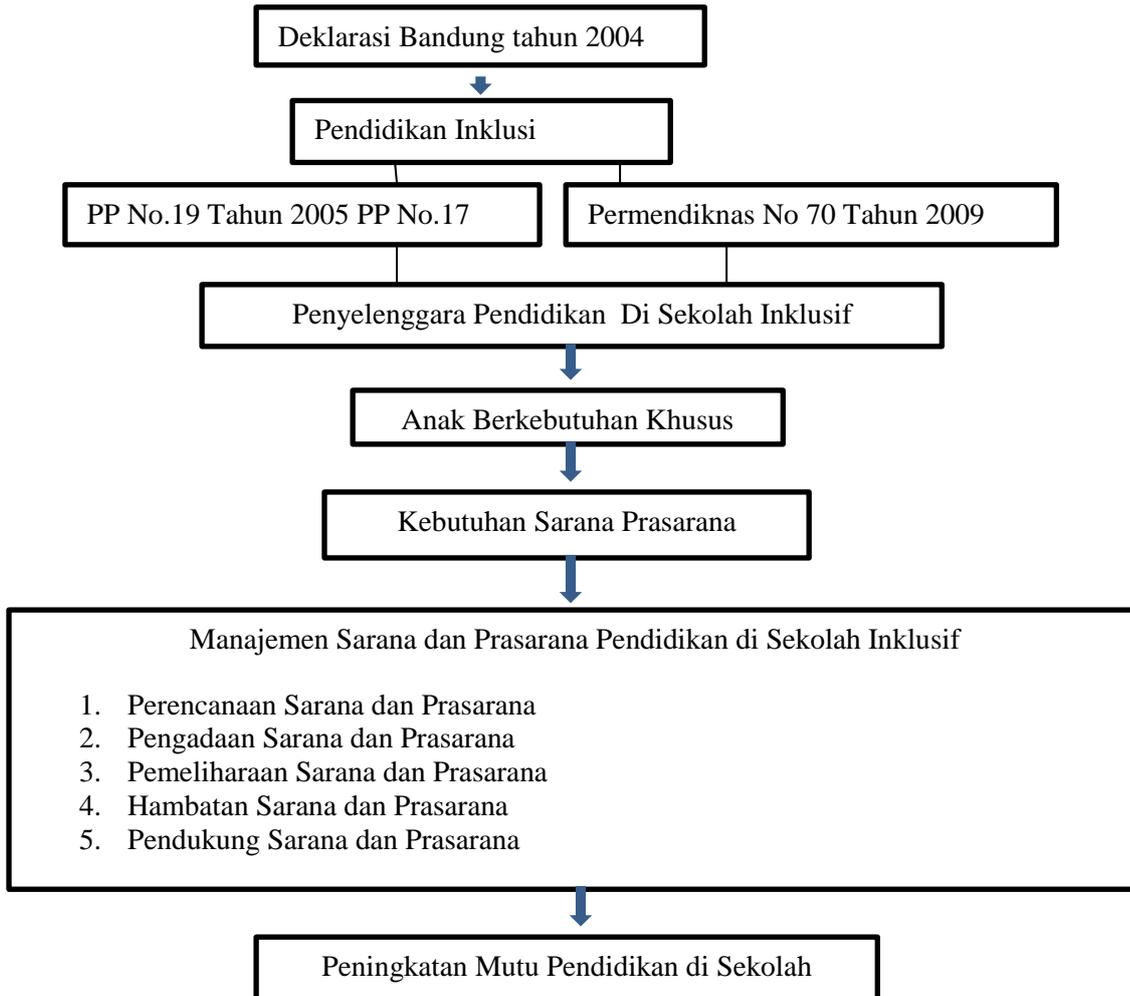
Sama halnya dengan negara-negara penyelenggara pendidikan inklusif, masyarakat di Indonesia sudah mulai peduli dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini membuat pemerintah membuat kebijakan baru yang dapat menampung keinginan masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia didukung dengan dikeluarkannya Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Dalam Permendiknas tersebut sudah diatur bagaimana tata cara penyelenggaraan pendidikan inklusif. sekolah harus menyediakan media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel. Maksud dari asesibel disini adalah disesuaikan dengan kebutuhan siswa ABK yang ada di sekolah. Dengan demikian sekolah perlu menyediakan media, sumber belajar, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh siswa ABK dengan tetap mengacu pada PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, maka perlu adanya manajemen yang baik di sekolah. Untuk itu semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah harus dikelola dengan baik. Salah satu sumber daya yang harus dikelola oleh sekolah adalah sarana dan prasarana. Keberadaan sarana prasarana menjadi salah satu faktor terpenting dalam pencapaian tujuan sekolah. Bila dikaitkan dengan sekolah inklusif, maka sarana prasarana yang ada juga harus memperhatikan kondisi siswa khususnya yang berkebutuhan khusus.

Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif harus memenuhi standar dan dikelola dengan baik. Pengelolaan sarana dan prasarana yang menjadi fokus penelitian ini meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, hambatan, dan pendukung.

Untuk lebih jelasnya dapat dipahami melalui bagan kerangka pikir berikut ini.



Gambar 2.5 Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Setting Penelitian

3.1.1 Lokasi dan tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di SMAN 14 Bandar Lampung yang beralamat di Kemiling Permai Bandar Lampung.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil dan genap tahun pelajaran 2021/2022

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah inklusif. Dengan penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran tentang fenomena-fenomena dan kenyataan-kenyataan yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti mengamati subjek dalam lingkungannya, berinteraksi dan menafsirkan pendapat subjek tentang dunia sekitar (Nasution, 2002:5). Dengan penelitian kualitatif diharapkan mendapat gambaran yang jelas tentang manajemen sarana dan prasarana di SMAN 14 Bandar Lampung.

ciri - ciri penelitian kualitatif adalah:

- (1) Latar alamiah (penelitian dilakukan pada situasi alamiah dalam suatu keutuhan), (2) Manusia sebagai alat (manusia/peneliti merupakan alat pengumpulan data yang utama), (3) Metode kualitatif (metode yang digunakan adalah metode kualitatif), (4) Analisa data secara induktif

(mengacu pada temuan lapangan), (5) Teori dari dasar/*grounded theory* (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), (6) Deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), (7) Lebih mementingkan proses daripada hasil, (8) Adanya batas yang ditentukan oleh fokus (perlunya batas penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian), (9) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data (punya versi lain tentang validitas, reliabilitas dan obyektivitas), (10) Desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), (11) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar peneliti dengan sumber data Moleong (2017).

Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Rahardjo (2021) studi kasus (*case study*) merupakan jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkapkan dapat terselesaikan. Raharjo (2021) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.

Pendekatan kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita-cerita pendek. Miles & Huberman (2014) Pendekatan kualitatif digunakan peneliti untuk melihat sifat dari masalah yang dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan, data dan informasi yang peneliti kumpulkan lebih banyak berupa keterangan-keterangan dan penjelasan yang bukan berbentuk angka. Sebagai konsekuensi dalam pendekatan kualitatif maka teknik analisa data yang peneliti gunakan bukan teknik statistik seperti pada pendekatan penelitian kuantitatif tetapi dengan teknik analisis data non-statistik atau analisis dengan prinsip logika.

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala yang bersifat alamiah/naturalistik dan mendasar sehingga tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Pendekatan kualitatif, data diperoleh dari wawancara berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Menurut Moleong (2017) Penelitian kualitatif pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran.

Sugiyono (2019) bahwa penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata atau gambar, tidak mementingkan angka, tetapi lebih pada proses. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara cermat, mendalam dan rinci sehingga dapat mengumpulkan data yang lengkap dan dapat menghasilkan informasi yang menunjukkan kualitas sesuatu, dan hasil penelitiannya hanya berlaku bagi wilayah yang diteliti.

jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Secara umum, studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas suatu individu.

Ditinjau dari segi tujuan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan memperoleh informasi mengenai sarana dan prasarana sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung secara rinci dan menyeluruh dari fokus dan penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada pertanyaan penelitian. Menurut Moleong (2017) bahwa metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan fungsi dan tujuan tertentu serta memperhatikan cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaannya.

Pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami kasus (satu lokasi) yang kemudian meneliti beberapa isu di dalam satu lokasi tersebut. Penelitian dengan metode ini kemudian terbilang kompleks, sebab melibatkan banyak isu dan lebih banyak kasus di dalam isu-isu tersebut.

Penelitian ini berusaha melakukan pengamatan yang mendalam dan menyeluruh terhadap gejala dan kasus yang terjadi di lapangan, dan data yang diungkap bukan berupa angka-angka melainkan kata-kata dan dokumen. Dalam penelitian ini yang akan diamati yaitu manajemen sarana dan prasarana sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung.

3.3 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan instrumen kunci penelitian mutlak diperlukan, karena terkait dengan penelitian yang telah dipilih yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2014), pada penelitian kualitatif peneliti wajib hadir di lapangan, karena peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data.

Menurut Sugiyono (2017) instrumen selain manusia dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Keuntungan dari peneliti sebagai instrumen adalah (1) subjek lebih tanggap akan kedatangan peneliti, (2) peneliti dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau setting penelitian, (3) keputusan yang berhubungan dengan dapat diambil cepat dan terarah, dan (4) informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara responden atau informan dalam memberikan informasi.

Sebagai peneliti kunci (*key instrument*), peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul, dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa

menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pangumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesan yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian.

Gambaran kehadiran peneliti sebagaimana terurai di atas sejalan dengan beberapa keuntungan yang diungkapkan oleh Bogdan & Biklen (1998); Patton (1990) peneliti sebagai instrumen utama akan menjadi, (1) subyek lebih tanggap akan kedatangan peneliti, (2) peneliti dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau setting penelitian, (3) keputusan yang berhubungan dengan dapat diambil cepat dan terarah, dan (4) informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara responden atau informan dalam memberikan informasi.

Daftar kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian mengenai manajemen sarana dan prasarana di sekolah inklusif (studi kasus di SMAN 14 Bandar Lampung), dapat dilihat pada Lampiran 1 daftar kehadiran peneliti halaman 124.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah manusia dan non manusia. sumber data manusia berfungsi sebagai informan kunci. Sedangkan sumber data non manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan atau tulisan.

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada kriteria sebagai berikut : 1. Subjek aktif terlibat di lingkungan yang menjadi sasaran penelitian, 2. Subjek bersedia dan mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti,

3. Subjek dapat memberikan informasi yang sebenarnya sesuai kebutuhan peneliti. Secara rinci informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

Sumber data	Kode	Jumlah
Kepala Sekolah	Ks	1
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	Wk. Ksw	1
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum	Wk. Kur	1
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana	Wk.Sarp	1
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas	Wk. Hms	1
Guru	Gr	3
Wali murid	Wm	1
Peserta didik	Pd	2
Stakeholders	St	1
Jumlah		12

Berdasarkan tabel di atas, informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah (Ks), wakil kepala sekolah bidang kesiswaan (Wk.Ksw), wakil kepala sekolah bidang kurikulum (Wk.Kur), wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana (Wk. Sarp), wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat (Wk.Hms), guru (Gr) 3 orang, wali murid (Wm), peserta didik (Pd), stakeholders (St) 1 orang.

Tabel 3.2 Pengodean

Teknik Pengumpulan Data	Kode	Sumber Data	Kode
Wawancara	W	Kepala Sekolah, Waka Bidang Kesiswaan, Waka bidang Sarpras, Waka Humas, Guru, Wali Murid, Peserta didik, Stakeholders	Ks, Wk. Ksw, Wk.Kur, Wk. Sarp, Wk.Hms, Gr, Wm, Pd, St
Observasi	O	Guru	Gr
Dokumentasi	D	<i>Stakeholders</i>	St

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dengan teknik tersebut peneliti akan memperoleh data utama dan data tambahan mengenai manajemen sarana dan prasarana sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Sesuai dengan namanya observasi akan dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan terhadap subyek penelitian dan kemudian mencatat hal-hal yang terjadi di lapangan dan berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah inklusif SMAN 14 Bandar Lampung.

Tabel 3.3 Pedoman Observasi

No	Ragam situasi yang diamati	Keterangan
1.	Keadaan Fisik dan lingkungan sekolah - suasana lingkungan sekolah inklusif SMAN 14 Bandar Lampung - ruang kelas, sarana dan prasarana di SMAN 14 Bandar Lampung - ruang dan penataan	Setting yang perlu dan event penting akan diambil gambar dan fotonya
2.	Rapat-rapat -rapat dengan guru-guru -rapat dengan orangtua wali murid -rapat penentuan pelatihan yang dibutuhkan	Jika terlewat digantikan wawancara
3.	Kegiatan lain -lomba-lomba di sekolah Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan penelitian	Setting dan event penting akan diambil gambar dan foto

3.5.2 Wawancara mendalam

Wawancara mendalam (*indept interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang digali dari sumber data yang langsung melalui percakapan atau tanya jawab terbuka untuk memperoleh data/informasi secara *holistic* dan jelas dari informan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. (Ahmad, 2005).

Dalam wawancara mendalam berlangsung suatu diskusi terarah diantara peneliti dan informan menyangkut masalah yang diteliti.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur karena dipandang lebih hidup susunannya dan membuat *interviewer* merasa nyaman seperti perbincangan biasa, namun tetap menggunakan pedoman wawancara yang diimprovisasi seperlunya ketika wawancara berlangsung.

Tabel 3.4 Pedoman wawancara tentang manajemen sarana dan prasarana sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung

No	Sub Fokus	Indikator	Sumber Data
1.	Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif SMAN 14 Bandar Lampung?	1. Sosialisasi 2. Skala Prioritas	Ks,Wk. Ksw, Wk. Kur, Wk.Sarp Wk. Hms, Gr, Wm, Pd, St
2.	Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif SMAN 14 Bandar Lampung?	1. Sumber Dana 2. Proses Pengadaan	
3.	Bagaimana Pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif SMA N 14 Bandar Lampung?	1. Tanggung jawab dalam pemeliharaan 2. Langkah-langkah dalam pemeliharaan	
4.	Bagaimana hambatan sarana dan prasarana di sekolah inklusif	Kendala yang dihadapi 1. Dana 2. Kurangnya SDM	

	SMAN 14 Bandar Lampung?	(Guru)	
5.	Bagaimana pendukung sarana dan prasarana di sekolah inklusif SMA Negeri 14 Bandar Lampung?	Faktor yang mendukung 1. SK 2. Bantuan dana	

3.5.3 Dokumentasi

Pendapat Sugiyono (2019), selain wawancara peneliti juga memeriksa sebuah dokumen. Berdasarkan teori dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek Sugiyono dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan ini merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan transkrip wawancara. Dokumen dalam penelitian ini terbagi atas 2 jenis yaitu : dokumen umum dan khusus . Dokumen umum berupa data tentang keberadaan SMAN 14 Bandar Lampung. dokumen khusus yaitu dokumen yang berkenaan dengan sarana dan prasarana sekolah inklusif .

Tabel 3.5.Pedoman studi dokumen

No	Jenis dokumen
1.	Manajemen -Profil sekolah -Visi misi sekolah -Struktur organisasi sekolah
2.	Data keterangan -Siswa (prestasi akademik dan non akademik) -Foto-foto atau kegiatan lain yang mendukung penelitian

3.6 Analisis Data Penelitian

Analisis data menurut Sugiyono (2019) adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Pengumpulan data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mencari dan mencatat hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan dengan objektif dan apa adanya.

3.6.2 Reduksi data

Setelah pengumpulan data, maka peneliti melakukan reduksi data dengan memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya yang mengacu pada fokus penelitian sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3.6.3 Display data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Penyajian data disusun sesuai dengan sub fokus penelitian agar mudah dipahami. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan. Data yang telah terkumpul

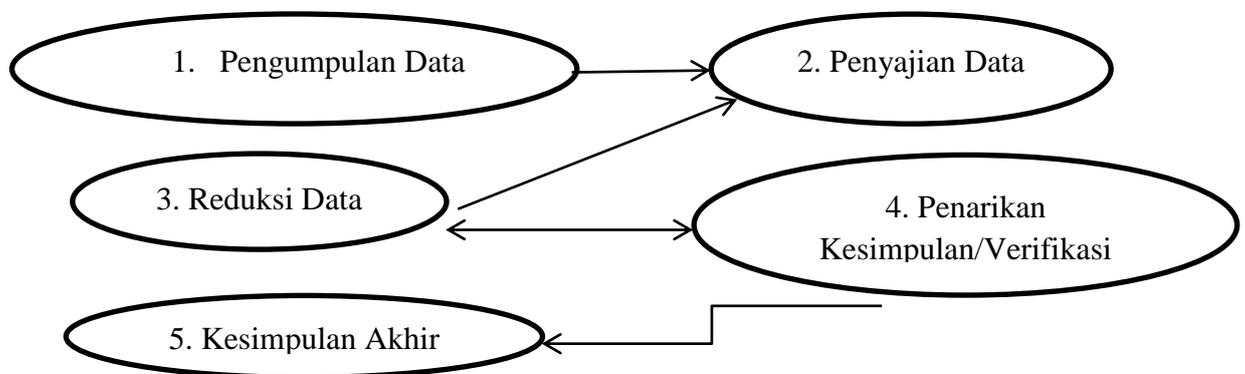
dikelompokkan sesuai dengan sub fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan bagan, dideskripsikan secara jelas gambaran sebenarnya yang ditemukan peneliti di lapangan.

3.6.4 Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan *display* data sehingga data dapat disimpulkan. Penarikan kesimpulan sementara, untuk diuji kembali dengan data di lapangan dengan cara merefleksi kembali, peneliti bertukar pikiran dengan ahli dalam hal ini pembimbing 1 dan 2 agar kebenaran ilmiah dapat tercapai. Kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan bagaimana manajemen sarana dan prasarana sekolah ramah anak.

3.6.5 Kesimpulan akhir

Mengambil kesimpulan akhir merupakan analisis akhir temuan baru dapat berupa deskripsi gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan bagaimana Manajemen sarana dan prasarana dalam mewujudkan sekolah inklusif.



Gambar 3.6. Analisis Data Kualitatif adopsi dari Miles and Huberman (2014)

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan kredibilitas atau derajat keabsahan data perlu dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti telah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Derajat kepercayaan data (kesahihan data) dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria (nilai) kebenaran, baik bagi pembaca maupun bagi subjek yang diteliti. Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik yaitu ketekunan pengamatan, pemeriksaan sejawat dan triangulasi. Dalam hal ini peneliti mengikuti pendapat Moleong (2017) dalam mengukur seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya/derajat kepercayaan atau kredibilitas (*credibility*). Supaya mencapai kredibilitas akan digunakan teknik sebagai berikut.

3.7.1 Ketekunan Pengamatan

Ketekunan atau keajegan pengamatan berarti menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

3.7.2 Triangulasi

Teknik triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode yang akan dijelaskan sebagai berikut :

3.7.2.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan Moleong (2017). Peneliti mengumpulkan informasi dari subjek dan beberapa informan penelitian hingga menemukan jawaban yang sama dari sumber data yang berbeda.

3.7.2.2 Triangulasi Metode

Teknik ini dilakukan dengan cara pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama Moleong (2017). Triangulasi ini untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, peneliti mengaitkan apakah informasi yang di dapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview.

3.7.3 Pemeriksaan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. selanjutnya untuk mengetahui dan mengecek serta memastikan hasil penelitian benar atau kurang valid, peneliti mendiskusikannya dengan teman kampus yang bernama Laili Fathia secara bertahap mengenai konsep-konsep yang dihasilkan di lapangan.

3.8 Tahapan Penelitian

Secara umum tahapan penelitian menurut Moleong (2017) terdiri atas empat tahap, yaitu: 1. Tahap pralapangan, dimana kegiatan yang dilakukan adalah mencari isu-isu manajemen sarana dan prasarana sekolah inklusif yang layak untuk dijadikan fokus penelitian 2. Tahap pekerjaan lapangan merupakan tahapan uji terfokus yang dilakukan peneliti di lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan pengkajian dokumen 3. Tahapan analisis data, yaitu

secara operasional transkrip wawancara dibaca berulang-ulang untuk dipilih yang terkait dengan fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan sub fokus penelitian dan sumbernya dan 4. Tahap pelaporan hasil penelitian, yaitu berupa hasil penelitian dari beberapa tahap sebelumnya yang berupa draft laporan hasil penelitian yang terdiri atas: latar belakang penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, penyajian data penelitian, pengkajian temuan penelitian dan kesimpulan yang ditulis secara naratif. Dan yang ke 5. Tahap pelaporan hasil penelitian.

Tahap pra lapangan, kegiatan yang dilakukan adalah: mencari isu-isu tentang manajemen sarana dan prasarana sekolah inklusif yang layak untuk dijadikan topik penelitian. Berdasarkan pencarian isu tersebut, akhirnya dipilihlah topik penelitian yaitu manajemen sarana dan prasarana sekolah inklusif di SMAN 14 Bandar Lampung. Setelah itu melakukan pengkajian literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dan melakukan pengamatan awal tentang manajemen sarana dan prasarana sekolah inklusi. Langkah selanjutnya adalah menetapkan substansi penelitian dan menyusun rencana penelitian tesis.

Adapun langkah pertama dalam menyusun rencana penelitian tesis yaitu menyiapkan proposal penelitian yang akan dikonsultasikan dengan pembimbing tesis yang telah ditetapkan. Setelah mendapat persetujuan pembimbing tesis, maka dilaksanakan seminar proposal disertai mengurus perizinan penelitian. Tahap pekerjaan lapangan merupakan tahapan studi terfokus yang dilakukan dilapangan dengan kegiatan yaitu pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan pengkajian dokumen. Wawancara dilaksanakan terhadap informan menggunakan pertanyaan terbuka dan tidak terstruktur. Data yang ingin diperoleh adalah informasi secara mendalam tentang manajemen sarana dan prasarana di sekolah.

3.8.1 Tahapan Pra-lapangan

Pada tahap pra-lapangan ada enam kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu : a) menyusun rancangan penelitian, b) memilih lapangan penelitian, c) mengurus perizinan, d) menjajaki dan menilai keadaan lingkungan, e) memilih informan, f) menyiapkan perlengkapan penelitian. Pada tahap pra-lapangan, ketika observasi peneliti membawa seperangkat alat dokumentasi yaitu berupa sebuah kamera dan buku catatan.

3.8.2 Tahap Persiapan

Peneliti melakukan pengamatan awal untuk memantapkan permasalahan penelitian dan menentukan subjek penelitian. Pengumpul data, yaitu untuk mengamati dan mencari berbagai informasi yang berhubungan dengan fokus dan subfokus penelitian mengenai manajemen sarana dan prasarana di sekolah inklusif.

3.8.3 Tahap Pengumpulan data

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk fokus dan subfokus merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu perlu diuji secara empiris. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan triangulasi metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.8.4 Tahap Analisis Data

Tahap analisis data ini, peneliti mengumpulkan data. Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data yaitu melakukan pemilihan terhadap data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan kemudian dianalisis sesuai dengan fokus penelitian dan dimasukkan dalam matrik data. Data dipaparkan dalam bentuk naratif, temuan disajikan dalam bentuk naratif, matrik dan diagram konteks. Selanjutnya pembahasan berikutnya adalah kesimpulan dan saran, dilanjutkan dengan tahap pelaporan hasil penelitian.

3.8.5 Tahap Pelaporan Hasil Penelitian

Pembuatan laporan hasil penelitian yang terdiri atas latar belakang, kajian Pustaka, metode penelitian yang digunakan, penyajian data penelitian, pengkajian temuan penelitian dan kesimpulan akhir dari hasil penelitian semuanya ditulis secara naratif. Peneliti menggunakan pedoman penelitian karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Tahap akhir peneliti melakukan seminar hasil penelitian dan melakukan perbaikan yang dilanjutkan dengan menyusun laporan hasil penelitian dan diakhiri dengan ujian komprehensif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian tentang manajemen sarana dan prasarana di sekolah inklusif SMAN 14 Bandar Lampung diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana di SMAN 14 Bandar Lampung melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Perencanaan analisis kebutuhan dilakukan setiap awal tahun ajaran baru.
2. Pengadaan sarana dan prasarana di SMAN 14 Bandar Lampung dilakukan oleh koordinator sarpras Sekolah .
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh warga sekolah beserta beberapa teknisi. Perawatan secara berkala dilakukan sesuai dengan jenis sarana dan prasarana yang dimiliki.
4. Faktor penghambat sarana dan prasarana di SMAN 14 Bandar Lampung yaitu kurangnya ketersediaan dana.
5. Faktor Pendukung sarana dan prasarana di SMAN 14 Bandar Lampung yaitu dengan adanya SK.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran yang berkaitan dengan manajemen sarana dan prasarana di sekolah inklusif SMAN 14 Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah perlu melengkapi sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus agar kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus berjalan lebih baik.
2. Pihak orang tua siswa seharusnya lebih berperan aktif dalam mendukung anak-anaknya terutama yang berkebutuhan khusus, agar pembelajaran menjadi jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisel, A. (2019). Manajemen Sistem Informasi Pembelajaran. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 2(2), 105-112.
- Amka, A. (2020). Manajemen Sarana Sekolah Penyelenggara Inklusif. In: Nizamia Learning Center.
- Bafadal, I. (2014). *Manajemen Perlengkapan Sekolah teori dan aplikasinya*. Bumi Aksara.
- Budiyanto, & 9., J. h. (2005). *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*.
- Depdiknas. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar biasa.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, (2009).
- Firdaus, E. (2010). Pendidikan inklusif dan implementasinya di Indonesia. *Paper presented at the Seminar Nasional Pendidikan*.
- Gargiulo, R. M., & Kilgo, J. L. (2005). *Young children with special needs*. United Nations Publications.
- Habibah, S. manajemen sarana dan prasarana pendidikan di smp negeri 13 makassar. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, 2(1), 25-34.
- Hairul, H. (2017). *Pengaruh Manajemen Pengelolaan Sarana dan Pra Sarana Belajar terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Semester VI Angkatan 2014 Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*].

- Hasibuan, H. M. S. (2009). *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Illahi, M. T. (2013). *Pendidikan Inklusif: konsep dan aplikasi*. Ar-ruzz media.
- Iswari, M. (2007). *Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Depdiknas.
- Kartikasari, O. D. (2014). Manajemen Sarana dan Prasarana Pembelajaran Di SD Tumbuh 1 Yogyakarta. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Kunc, N. (1992). The need to belong: Rediscovering Maslow's hierarchy of needs.
- Kustawan, D. (2013). *Bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus*. Luxima Metro Media.
- Martha, D., & Suryana, D. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusif Anak Usia dini.
- McLeskey, J. L., Rosenberg, M. S., & Westling, D. L. (2017). *Inclusion: Effective practices for all students*. Pearson.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Mulyati Siti, Y. d. K., Aan. . (2008). *Pengelolaan Pendidikan*. Jurusan Adminitrasi Pendidikan.
- Olsen, G. W., & Fuller, M. L. (2008). *Home-school relations: Working successfully with parents and families*. Allyn & Bacon.
- Prihatin, E. (2011). *Teori Adminitrasi Pendidikan*. Alfabeta.
- Samani, M., Hariyanto. (2011). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Remaja Rosdakarya.
- Sinta, I. M. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 4(1), 77-92.
- Smith, J. D. (2006). Inklusi sekolah ramah untuk semua. *Bandung: Nuansa*.
- Sowiyah. (2020). *Manajemen Sekolah Inklusif*. Graha Ilmu.
- Staub, D., & Peck, C. A. (1995). What Are the Outcomes for Nondisabled Students? *Educational leadership*, 52(4), 36-40.
- Subagya. (1990). *Manajemen Logistik*. CV. Haji Masagung.

- sukirman, H. d. (2002). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. FIP Pres.
- Suryosubroto. (2004). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Rineka Cipta.
- Sutjihati.S. (2006). *Psikologis Anak luar biasa*. PT. Refika Aditama.
- Tarmansyah, S. (2007). INKLUSI: Pendidikan Untuk Semua. *Jakarta Dep. Pendidik. dan Kebud. RI*.
- Terry, G. (2005). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.
- Wahyuningrum, H. (2000). *Buku Ajar Manajemen Fasilitas Pendidikan*. Fip UNY.
- Yudi, A. A. (2012). Pengembangan mutu pendidikan ditinjau dari segi sarana dan prasarana (Sarana dan prasarana PPLP). *Cerdas Sifa Pendidikan, 1(1)*.